Katalog : 4102002.9417

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PEGUNUNGAN BINTANG

2020

BADAN PUSAT STATISTIK
KAB PEGUNUNGAN BINTANG

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PEGUNUNGAN BINTANG

2020

I P M

Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Pegunungan Bintang
Tahun 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pegunungan Bintang

UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT

PENGETAHUAN

STANDAR HIDUP LAYAK

Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020

ISBN: 978-623-95853-3-4
Nomor Publikasi / *Publication Number* : 94170.2101
Nomor Katalog / *Catalog Number* : 4102002.9417

Ukuran Buku / *Book Size* : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman / *Page Number* : xiv + 111 hal / *pages*

Naskah / *Manuscript*:
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang
BPS-Statistics of Pegunungan Bintang Regency

Penyunting / *Editor*:
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang
BPS-Statistics of Pegunungan Bintang Regency

Gambar Kulit / *Cover* :
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang
BPS-Statistics of Pegunungan Bintang Regency

Penerbit / *Published by* :
©Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang
BPS-Statistics of Pegunungan Bintang Regency

Pencetak / *Printed by* :

Sumber Ilustrasi/ *Graphics by :*
Agung Yudianto, S.Tr. Stat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik
Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

******

https://pegunungan bintangkab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Tuhan karena atas limpahan dan Karunia-Nya Publikasi **"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020"** dapat diselesaikan. Pembuatan Publikasi IPM Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 merupakan salah satu tindak lanjut dari publikasi sebelumnya, yang memuat indeks komposit pembangunan manusia. Indeks-indeks tersebut memberikan gambaran kuantitatif tentang kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia.

Dengan adanya informasi ini diharapkan pemerintah daerah dapat melihat apa yang telah dikerjakan dan apa yang sedang dikerjakan dalam kaitannya dengan pembangunan di Pegunungan Bintang, selanjutnya membuat perencanaan kebijakan yang tepat terhadap pembangunan manusia di daerah ini untuk pembangunan ke depan. Indikator-indikator yang dimuat ini juga diharapkan berguna bagi para perencana dalam penyusunan program pembangunan manusia dan dipakai sebagai parameter untuk mengevaluasi tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan manusia.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diterbitkan diucapkan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Oksibil, Januari 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pegunungan Bintang

Samijan, S.ST, M.Stat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI.. v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan dan Sasaran 7

1.3. Ruang Lingkup 7

1.4. Istilah-istilah yang Digunakan 8

BAB II KONSEP DAN METODOLOGI 9

2.1. Sejarah Penghitungan IPM 9

2.2. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia 15

2.3. Penghitungan Indeks Komponen 18

2.3.1.Harapan Hidup 19

2.3.2.Pengetahuan 19

2.3.3.Standar Hidup Layak 23

2.4. Tahapan Penghitungan IPM 27

2.5. Klasifikasi Pembangunan Manusia 29

BAB III INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 30

3.1. Dimensi Kesehatan 31

3.1.1.Angka Harapan Hidup (AHH) 31

3.2. Dimensi Pengetahuan 33

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

3.2.1.Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....34
3.2.2.Harapan Lama Sekolah (HLS).....36
3.3. Dimensi Hidup Layak.....39
3.3.1.Pengeluaran per riil Kapita yang Disesuaikan.....39
3.4. IPM Kabupaten Pegunungan Bintang 42

BAB IV ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 46
4.1. Kependudukan.....46
4.1.1.Jumlah dan Sebaran Penduduk 46
4.1.2.Komposisi Penduduk.....50
4.1.3.Status dan Usia Perkawinan Pertama Wanita 55
4.1.4.Pemakaian Alat/Cara KB.....57
4.2. Pendidikan 59
4.2.1.Angka Buta Huruf dan Melek Huruf 60
4.2.2.Partisipasi Sekolah 62
4.2.3.Tingkat Pendidikan.....68
4.3. Ketenagakerjaan 69
4.3.1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....70
4.3.2.Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 71
4.3.3.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....74
4.4. Kesehatan 75
4.4.1.Penolong Kelahiran 76
4.4.2.Penduduk dan Keluhan Sakit.....77
4.5. Perumahan dan Lingkungan 82
4.5.1.Kualitas Rumah Tinggal 82
4.5.2.Fasilitas Rumah 84
4.6. Pendapatan dan Pengeluaran.....88

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

4.6.1.Distribusi Pendapatan dan Gini Rasio 89

4.6.2.Pengeluaran Rumah Tangga dan Pengeluaran Penduduk Menurut Jenis Pengeluaran 91

4.7. Kemiskinan.....92

4.7.1.Jumlah dan Persentasse Penduduk Miskin 93

4.7.2.Garis Kemiskinan.....95

4.7.3.Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 100

5.1. Kesimpulan 100

5.2. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN.....103

https://pegunungan bintangkab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik.....12

Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP dan BPS ..13

Tabel 2.3 Konversi Ijazah Terakhir.....22

Tabel 2.4 Konversi Lama Sekolah Berdasar Ijazah Terakhir 22

Tabel 2.5 Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM 28

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Distrik, 2020 47

Tabel 4.2 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 54

Tabel 4.3 APK dan APM Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 65

Tabel 4.4 TPAK di Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Jenis Kelamin, 2020 71

Tabel 4.5 TPAK dan TKK di Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Jenis Kelamin, 2020.....72

Tabel 4.6 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Utama, 2020 73

Tabel 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, 2020 75

Tabel 4.8 Distribusi Pendapatan Penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020.....90

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tujuh Belas Goals SDGs.....3

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi IPM di UNDP.....10

Gambar 2.2 Perbedaan IPM Metode Lama dan Metode Baru di Indonesia.....15

Gambar 2.3 Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru 18

Gambar 2.4 Persentase Komoditas Indeks Pengeluaran Metode Baru 24

Gambar 2.5 Ilustrasi Penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 26

Gambar 3.1 IPM Kabupaten Pegunugan Bintang dan Komponennya, 2020 30

Gambar 3.2 Perkembangan AHH Pegunungan Bintang, 2018-2020.....31

Gambar 3.3 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sekitarnya, 2020 32

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sekitarnya, 2020 34

Gambar 3.5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pegunungan Bintang, 2018-2020 35

Gambar 3.6 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sekitarnya, 2020 37

Gambar 3.7 Perkembangan HLS Pegunungan Bintang, 2018-2020.....38

Gambar 3.8 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pegunungan Bintang (dalam ribu rupiah), 2020.....40

Gambar 3.9 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pegunungan Bintang (dalam ribu rupiah), 2020.....41

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 3.10 Perkembangan Pencapaian IPM Kabupaten Pegunungan Bintang, 2011 – 2020 43

Gambar 3.11 Pencapaian IPM Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pemekaran Kabupaten Jayawijaya Lainnya, 2020.....44

Gambar 3.12 Pencapaian IPM Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020...45

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2020.....49

Gambar 4.2 *Sex Ratio* Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Distrik, 2020.....51

Gambar 4.3 Piramida Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020.....52

Gambar 4.4 Status Perkawinan Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Pegunungan Bintang, 2020.....55

Gambar 4.5 Persentase Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Kawin Pertama dan Rata-rata Usia Kawin Pertama Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 56

Gambar 4.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Pernah/Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, 2020 58

Gambar 4.7 Angka Buta Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, 2020 60

Gambar 4.8 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, 2020.....61

Gambar 4.9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020.....63

Gambar 4.10 Angka Partisipasi Murni (APM) Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020.....64

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 4.11 Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Jayawijaya, 2020 66

Gambar 4.12 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 68

Gambar 4.13 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020.....76

Gambar 4.14 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Sakit dan Terganggu Kegiatan Sehari-hari Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020.....78

Gambar 4.15 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Sakit dan Berobat Jalan di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 80

Gambar 4.16 Alasan Penduduk yang Mengalami Keluhan Sakit dan Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 81

Gambar 4.17 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kondisi Perumahan Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020.....83

Gambar 4.18 Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 85

Gambar 4.19 Fasilitas Buang Air Besar Rumah Tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020.....86

Gambar 4.20 Tempat Pembuangan Tinja Rumah Tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 87

Gambar 4.21 Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan Provinsi Papua, 2020.....91

Gambar 4.22 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Pegununan Bintang, Jayawijaya, dan Papua, 2018-2020 93

https://pegunungenbintangkab.bps.go.id

Gambar 4.23 Persentase Penduduk Miskin Kab. Pegunungan Bintang dan Wilayah Pemekaran Lainnya, 2019 94

Gambar 4.24 Garis Kemiskinan Kab. Pegunungan Bintang dan Wilayah Pemekaran Lainnya, 2019.....95

Gambar 4.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Peg. Bintang dan Wilayah Pemekaran Lainnya, 2020.....97

Gambar 4.26 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Peg. Bintang, 2018-2020 98

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Indeks Komponen IPM per Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2020 104

Lampiran 2 Perkembangan IPM per Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2017 – 2020 105

Lampiran 3 Ranking Pertumbuhan Komponen AHH Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 – 2020 106

Lampiran 4 Ranking Pertumbuhan Komponen HLS Kabupaten/Kota di Papua, 2015 – 2020 107

Lampiran 5 Ranking Pertumbuhan Komponen RLS Kabupaten/Kota di Papua, 2015 – 2020 108

Lampiran 6 Ranking Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 – 2020 109

Lampiran 7 Ranking Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 – 2020 110

Lampiran 8 Ranking Pertumbuhan IPM Berdasarkan Wilayah Adat Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 – 2020 111

https://pegunungambintangkab.bps.go.id

https://pegunungan bintangkab.bps.go.id

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Konsep pembangunan manusia pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas. Konsep ini mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report* 1990).

> *Tiga dimensi dasar pembangunan manusia adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.*

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM kali pertama pada tahun 1990. Sampai dengan tahun 2017, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. UNDP memperkenalkan dua indikator baru yang sekaligus menggantikan dua indikator metode lama. Indikator harapan lama sekolah menggantikan indikator

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

melek huruf, sementara Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Di Indonesia, IPM mulai dihitung pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Sejak tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sampai saat ini sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita tetap digunakan dalam penghitungan. Metode baru diaplikasikan di Indonesia sejak tahun 2014 dengan angka *backcasting* dari tahun 2010.

https://pegunungganbintangkab.bps.go.id

Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkenalkan agenda pembangunan yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015 yang menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang memasuki batas waktu pencapaian pada tahun 2015. Konsep SDGs ini berkaitan dengan perubahan situasi dunia tentang isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs dibentuk oleh tiga pilar dengan 17 tujuan (*goal*) yang harus dicapai.

SDGs adalah konsep pembangunan global yang dicanangkan PBB mulai tahun 2015 dengan target penyelesaian pada 2030. SDGs terdiri dari 3 pilar, 17 tujuan dan 169 target.

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDGs, yaitu:

1. indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*) yaitu pendidikan dan kesehatan,

2. indikator yang melekat pada lingkungan yang kecil *(Social Economic Development*) yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi,
3. indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Gambar 1.1 Tujuh Belas Tujuan (*Goals*) SDGs

Diantara 17 tujuan SDGs, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Target 3A bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, angka harapan hidup saat lahir secara tidak langsung akan menjadi salah satu indikator dari SDGs. Secara tidak langsung pula, angka harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu angka kematian neonatal ditekan guna mencapai target tersebut.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4b, dinyatakan bahwa memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, ketika target ini dicapai maka angka rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.

Tiga tujuan SDGs yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ke-3, ke-4, dan ke-8.

Sedangkan tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam tujuan kedelapan, terdapat target 8A yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minimal tujuh persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Agenda Pembangunan Dalam Nawacita

Pada tingkat nasional, agenda pembangunan pemerintah tertuang dalam Nawacita. Nawacita berisi sembilan agenda prioritas untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Isu tentang pembangunan manusia juga menjadi butir penting dalam Nawacita. Butir kelima Nawacita menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal itu dilakukan dengan melakukan dua program, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Agenda pembangunan nasional dalam pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla tahun 2014-2019 tertuang dalam program Nawacita

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

https://pegunungandbintangkab.bps.go.id

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyajikan data dan informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain itu penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumberdaya manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi:

a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang.
b. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang.
c. Diperolehnya gambaran tentang perkembangan ukuran pembangunan manusia (IPM) dan indikator - indikator sosial lainnya di Kabupaten Pegunungan Bintang.
d. Terumuskannya implikasi masalah dan kebijakan untuk menangani berbagai masalah yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sedangkan ruang lingkup materi penulisan ini meliputi:

- Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi : lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent living*).

- Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang.

1.4 Istilah-istilah Yang Digunakan

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup, pendidikan dan standar hidup.
- Angka Harapan Hidup (AHH), rata-rata perkiraan usia yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir.
- Harapan Lama Sekolah (HLS), lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menggambarkan lamanya penddidikan yang ditempuh atau jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dapat disetarakan dengan tingkat pendidikan.
- Indeks Daya Beli/Standar Hidup, didasarkan pada paritas daya beli (PPP).

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

KONSEP DAN METODOLOGI

2

2.1 Sejarah Penghitungan IPM

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia *(Human Development Index)* yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia *(Human Development Report)*. Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

BPS melakukan penghitungan IPM sejak tahun 1996

Pada tahun 2011, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP engganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka

Sejak dirilis UNDP pada tahun 1990, penghitungan IPM terus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu, terakhir adalah tahun 2014

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Dalam perkembangannya, metode penghitungan IPM terus mengalami penyempurnaan. Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

https://pegunungan bintang kab.bps.go.id

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi IPM di UNDP

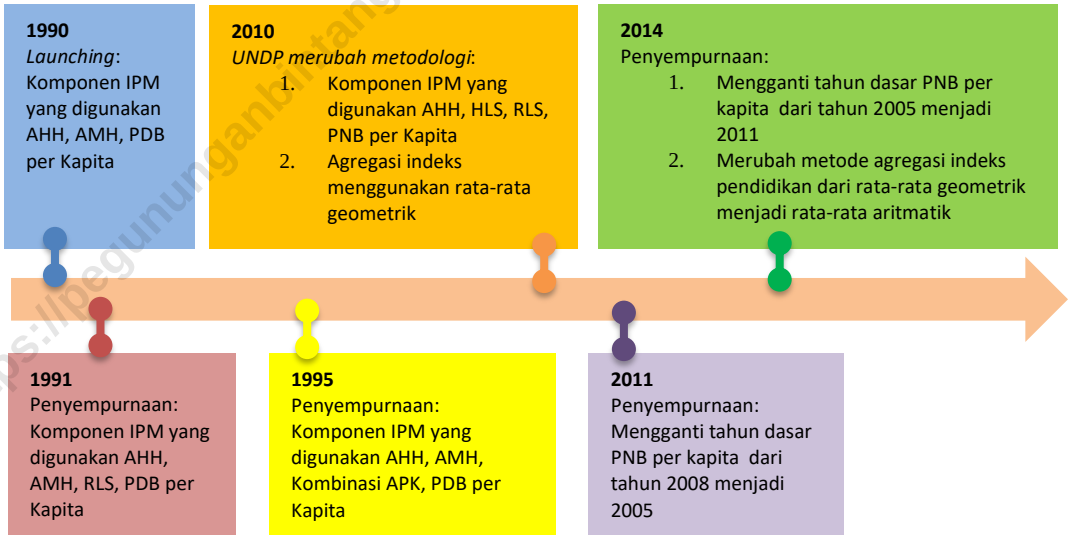

Catatan:

AHH : Angka Harapan Hidup saat lahir
AMH : Angka Melek Huruf
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
PDB : Produk Domestik Bruto
APK: Angka Partisipasi Kasar
HLS: Harapan Lama Sekolah
PNB: Produk Nasional Bruto

Pada tahun 2014, penghitungan IPM kembali mengalami penyempurnaan. UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP tersebut bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia sesuai dengan pekembangan zaman.

Mengapa Metodologi Penghitungan IPM Diubah?

Setidaknya ada dua hal mendasar mengapa terjadi perubahan metodologi penghitungan IPM, yaitu:

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebakan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Penghitungan IPM diubah karena beberapa indikator yang digunakan sudah tidak relevan lagi seperti AMH dan PDB per kapita

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM metode lama menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3, dan 3. Dengan rata-rata aritmatik dapat diperoleh dengan mudah bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah (3 + 3 + 3) /3 = 3. Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu (2 + 3 + 4) = 3. Secara nyata terlihat bahwa ada ketimpangan capaian antardimensi pembangunan manusia. Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di suatu wilayah. Misal, capaian ketiga dimensi secara berturut-turut menjadi 1, 3, dan 5. Dalam kondisi ketimpangan yang ekstrim ini, rata-rata pembangunan manusia tetap 3. Kondisi ini sama dengan capaian suatu wilayah pada contoh kasus pertama. Rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi

Rata-rata aritmatik tidak dapat menjelaskan ketimpangan capaian antar dimensi pembangunan manusia

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

Apa Saja Yang Berubah?

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Indikator yang diubah antara lain AMH dan PDB per kapita; agregasi indeks juga diubah dari aritmatik menjadi geometrik

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode baru UNDP dan BPS

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)		(3)	
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	Pengeluaran per kapita	PNB per Kapita*	Pengeluaran per kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik		Rata-rata Geometrik	

*Data PNB tidak tersedia di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik (geometric mean). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cederung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

IPM Metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selain itu PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

IPM metode baru menuntut keseimbangan ketiga dimensi agar capaian IPM menjadi optimal

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

https://pegunungan bintang kab.bps.go.id

Bagaimana Dampaknya?

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM. Pertama, perubahan level IPM.

Secara umum level IPM metode baru lebih rendah dari IPM metode lama sehingga terjadi perubahan peringkat IPM

Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat

angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

2.2 Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Gambar 2.2 Perbedaan IPM Metode Lama dan Metode Baru di Indonesia

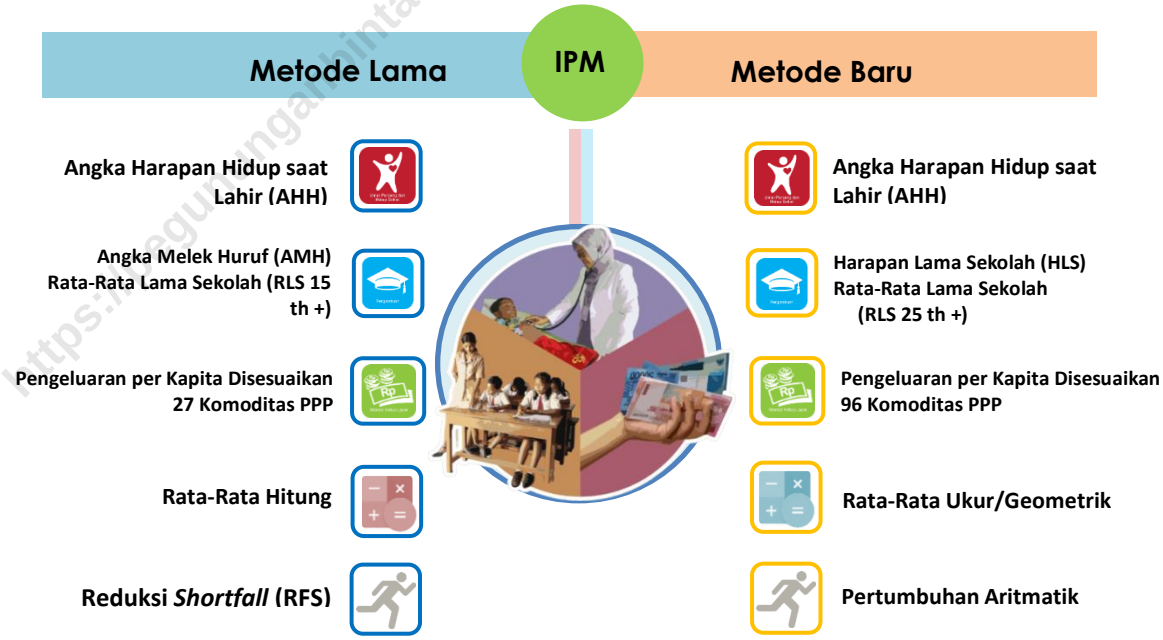

$$IPM = \frac{1}{3}\left(I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan}\right) \text{ x } 100$$

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}} \text{ x}100$$

https://pegunungangbintangkab.bps.go.id

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbarui penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Penghitungan IPM metode baru di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 2014

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga diganti dengan

https://pegunungan bintangkab.bps.go.id

harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersedian data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (purcashing power parity) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Karena ketersedian data, PNB per kapita diproksi dengan pengeluaran per kapita dari data Susenas

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

https://pegunungantarakab.bps.go.id

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi shortfall. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

2.3 Penghitungan Indeks Komponen

Gambar 2.3 Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

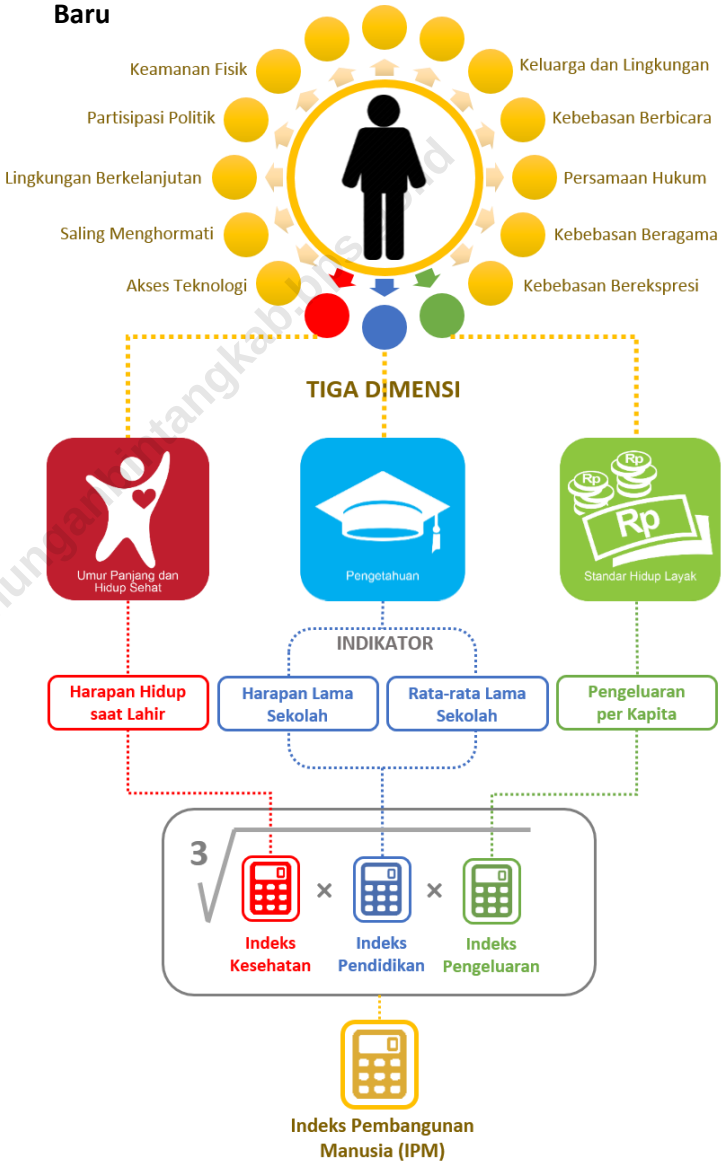

https://pegunungankotangkab.bps.go.id

2.3.1 Harapan Hidup

Pembangunan manusia mengupayakan untuk bisa dapat mencapai "usia hidup" yang panjang dan sehat. Indikator kesehatan yang merepresentasikan hal ini sebenarnya cukup banyak, antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), namun masukan dari UNDP telah sepakat untuk hal ini digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan pertimbangan ketersediaan data dan senstitivitas indikator tersebut bagi suluruh tingkatan negara.

Angka Harapan Hidup (AHH) menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. AHH merefleksikan dampak yang lebih komprehensif dari pembangunan manusia yang juga mencakup bidang kesehatan.

Di Indonesia AHH dihitung dengan metode tidak langsung dari hasil proyeksi SP2010 dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. AHH dihitung secara matematis dari Angka Kematian Bayi (AKB). Data AKB dilakukan melalui pendekatan rata-rata anak yang dilahirkan hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup (AMH). Prosedur penghitungan AHH yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei. Disinilah terlihat volatilitas indikator IPM yang berbeda dengan indikator lainnya, karena IPM lebih merupakan indikator dampak dari pembangunan yang bisa dipotret setelah beberapa tahun.

AHH menggambarkan rata-rata perkiraan usia yang dapat dicapai sesorang selama hidup

https://pegunungan-bintang.bps.go.id

2.3.2 Pengetahuan

Selain usia hidup, pengetahun juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembanguan manusia. Pada metode baru, terjadi perubahan indikator yang digunakan dalam penghitungan indeks pendidikan atau pengetahuan. Sebelumnya, indikator yang digunakan adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-

rata lama sekolah (RLS). Namun pada metode baru, angka melek huruf tidak lagi digunakan karena dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Sebagai pengganti AMH, digunakan angka harapan lama sekolah (HLS).

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk
lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

HLS memperkirakan berapa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang

Sumber data penghitungan HLS diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren berasal dari Direktorat Pendidikan Islam.

Adapun penghitungan HLS adalah sebagai berikut:

1. **Langkah Pertama** menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun keatas).
2. **Langkah Kedua** menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas).

https://pegunungganbintangkab.bps.go.id

3. **Langkah Ketiga** menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas). Langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur.
4. **Langkah Keempat** Menghitung harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas).

Rumus HLS

$$HLS_a^t = FK\ x \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur *a* di tahun *t*
E_i^t = Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t*
P_i^t = Jumlah penduduk usia *i* pada tahun *t*
i = Usia (a, a + 1, ..., n)
FK = Faktor Koreksi Pesantren

Faktor Koreksi Pesantren

$$Rasio\ Santri\ Mukim = \frac{Jumlah\ Bermukim}{Jumlah\ Santri\ Seluruhnya}$$

$$Jumlah\ Santri\ Sekolah\ \&\ Mukim\ =\ Rasio\ Santri\ Mukim\ x\ Jumlah\ Santri\ Sekolah$$

$$Faktor\ Koreksi\ Pesantren = \frac{Jumlah\ Santri\ Sekolah\ dan\ Mukim}{Jumlah\ Penduduk\ Umur\ 7\ Tahun\ ke\ atas}$$

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

Langkah untuk menghitung RLS adalah sebagai berikut:

1. **Langkah Pertama** menyeleksi penduduk usia 25 tahun ke atas.
2. **Langkah Kedua** menghitung lamanya sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Jika partisipasi sekolah adalah tidak/belum pernah bersekolah, maka lamanya sekolah = 0.
   - Jika partisipasi sekolah adalah masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut:

Tabel 2. 3 Konversi Ijazah Terakhir

Keterangan	Lama Sekolah
(1)	(2)
Masih bersekolah di SD - S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1
	Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Adapun konversi lama sekolah berdasarkan ijazah terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)
(1)	(2)
Tidak Punya Ijazah	0
SD / SDLB / MI / Paket A	6
SMP / SMPLB / MTs / Paket B	9
SMA / SMLB / MA / SMK / Paket C	12
D1 / D2	14
D3 / Sarjana Muda	15
D4 / S1	16
S2 / S3	18

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

3. Langkah ketiga menghitung rata-rata lama sekolah

$$RLS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} lama\ sekolah\ penduduk_i$$

Keterangan:

RLS : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

Lama sekolah penduduk$_i$: lama sekolah penduduk ke-*i* di suatu wilayah

n : jumlah penduduk (*i = 1, 2, 3,..., n*)

2.3.3 Standar Hidup Layak

Selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional, UNDP memilih Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product (PDB/GDP) per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator hidup layak. Namun dalam metode baru, PDB per kapita digantikan oleh Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Sayangnya PNB per kapita di Indonesia tidak tesedia pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota, sehingga didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data susenas.

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi

Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung paritas daya beli/ *Purchasing Power Parity* (PPP), sedangkan pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

https://pegunungan bintang kab.bps.go.id

Gambar 2.4 Persentase Komoditas Indeks Pengeluaran Metode Baru

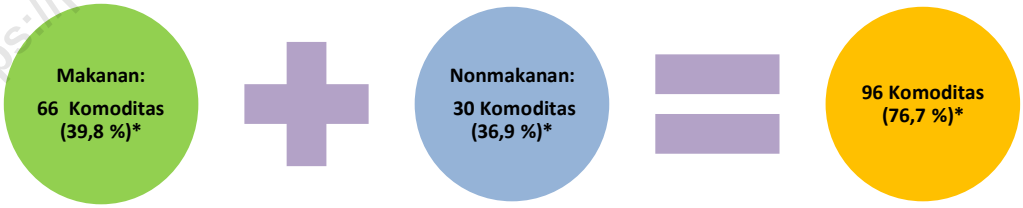

** Persentase terhadap total pengeluaran rumah tangga*

Langkah penghitungan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan adalah sebagai berikut:

A. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari Susenas

1. **Langkah Pertama** : hitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga untuk setiap anggota rumah tangga
2. **Langkah Kedua** : hitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota.
3. **Langkah Ketiga** : menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan (Y'_t) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dikali 12 dibagi 1000 (12/1000).

B. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dalam Harga Konstan (riil)

Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y'_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$= IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

C. Menghitung Paritas Daya Beli/Purchasing Power Parity (PPP)

1. **Langkah Pertama**, menghitung harga rata-rata komoditas terpilih. Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK).

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan:

P_i= Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah

V_i= Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah

Q_i= Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

2. **Langkah Kedua,** menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut:

$$Paritas\ Daya\ Beli_j = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}}\right)^{1/m}$$

Keterangan:

p_{ij} : harga komoditas *i* di Jakarta Selatan

p_{ik} : harga komoditas *i* di kab/kota *j*

m : jumlah komoditas

3. **Langkah Ketiga,** menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{Paritas\ Daya\ Beli}$$

Keterangan

Y_t^{**} : rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Gambar 2.5 Ilustrasi Penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

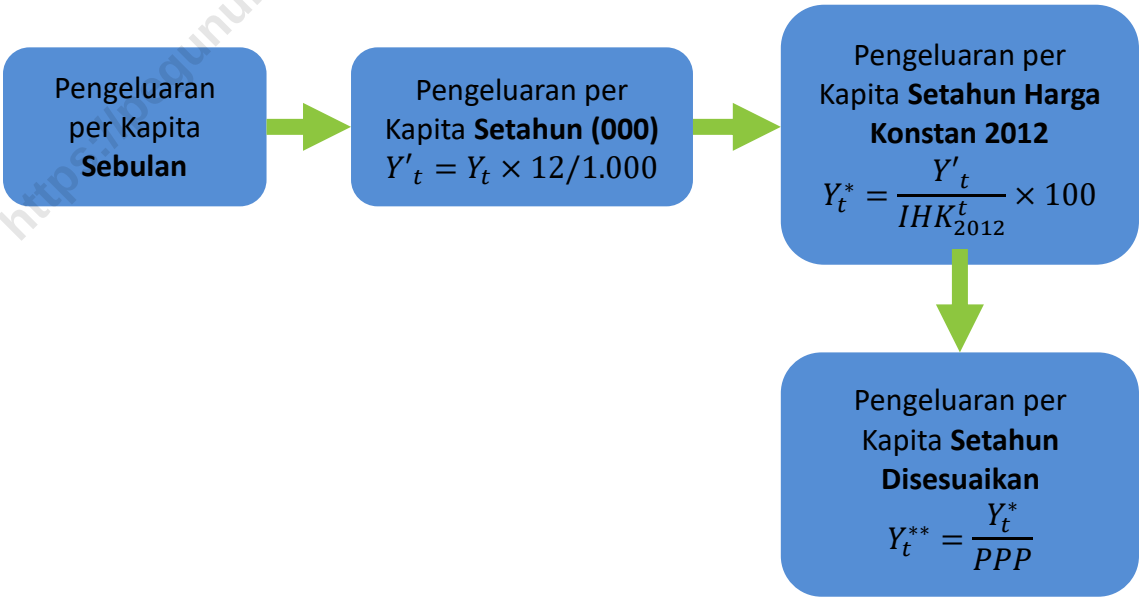

https://pegunungandbintangkab.bps.go.id

2.4 Tahapan Penghitungan IPM

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Tahap pertama** penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen penyusun IPM (Harapan Hidup, Pendidikan dan Standar Hidup Layak).

1. Menghitung indeks kesehatan

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

AHH : Angka Harapan Hidup

2. Menghitung indeks pendidikan

Dimensi Pendidikan

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah

3. Menghitung indeks pengeluaran

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})}$$

https://pegunungan bintangkab.bps.go.id

Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 2.5 Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Satuan	Nilai Minimum		Nilai Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rupiah	100 (PPP$)	1.007.436 *	107.721 (PPP$)	26.572.352 **

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

B. **Tahap kedua** perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata geometrik dari masing-masing indeks dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

C. **Tahap ketiga** adalah mengukur pertumbuhan IPM per tahun, yaitu mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

$$\boldsymbol{Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100}$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.5 Klasifikasi Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal capaian pembangunan manusia.

- Kelompok "Sangat Tinggi" : IPM ≥ 80,0
- Kelompok "Tinggi" : 70 ≤ IPM < 80
- Kelompok "Sedang" : 60 ≤ IPM < 70
- Kelompok "Rendah" : IPM < 60

https://pegunungenbintangkab.bps.go.id

INDEKS PEMBANGUNGAN MANUSIA
KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

3

Gambar 3.1 IPM Kabupaten Pegunugan Bintang dan Komponennya 2020

Dimensi Kesehatan		Angka Harapan Hidup (AHH)	**64,44 Tahun**
Dimensi Pengetahuan		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	**2,81 Tahun**
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	**6,25 Tahun**
Dimensi Hidup Layak		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)	**Rp 5.409.000,-**
Indeks Pembangunan Manusia	**IPM**	Indeks Pembangunan Manusia	**45,44**

https://pegunungambintangkab.bps.go.id

Secara ringkas nilai IPM dan komponen penyusunnya di Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2020 tampak pada gambar di atas. Nilai IPM Pegunungan Bintang tahun 2020 sebesar 45,44. Nilai Dimensi kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH) adalah sebesar 64,44 tahun. Nilai dimensi pengetahuan yang diwakili Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah 2,81 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 6,25 tahun; sedangkan nilai dimensi hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan adalah sebesar Rp5.409.000,- per orang per tahun. Adapun penjelasan berikutnya akan dibahas lebih lanjut.

3.1 Dimensi Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat kesehatan, menggambarkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Kesehatan merupakan salah satu masalah penting karena hal itu merupakan dasar bagi seseorang untuk beraktivitas secara produktif dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan di sektor kesehatan perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, terjangkau dan berkualitas.

3.1.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (e_0). Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup, memberikan gambaran semakin tingginya kualitas kesehatan penduduk di daerah tersebut.

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

Gambar 3.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pegunungan Bintang, 2017 - 2019

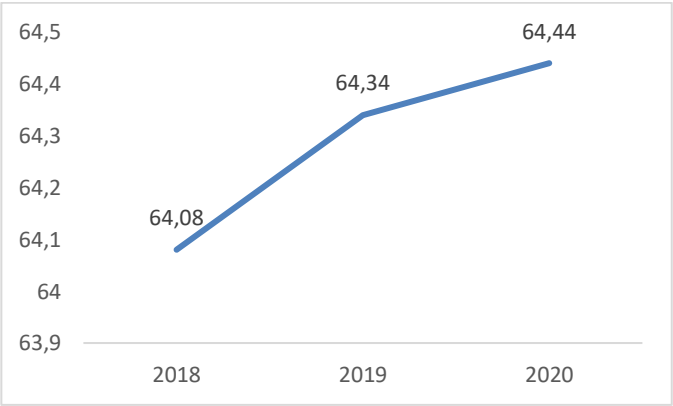

Sumber : BPS Provinsi Papua

Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang yang lahir pada tahun 2020 diharapkan dapat bertahan hidup sampai umur 64 tahun 11 bulan

Dalam perkembangannya, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 AHH penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 64,08 tahun, sedangkan pada tahun 2019 peluang hidup meningkat menjadi 64,34 dan terus meningkat menjadi 64,44 pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa bayi atau penduduk yang baru lahir pada tahun 2020 di Kabupaten Pegunungan Bintang diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 64 hingga 65 tahun. Angka ini masih relatif jauh dari angka AHH ideal yaitu 85 tahun. Angka harapan hidup Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 masih berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Papua, yaitu 65,79 akan tetapi berada di atas Angka Harapan Hidup kabupaten induk Jayawijaya yang sebesar 59,64.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 3.3 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sekitarnya, 2020

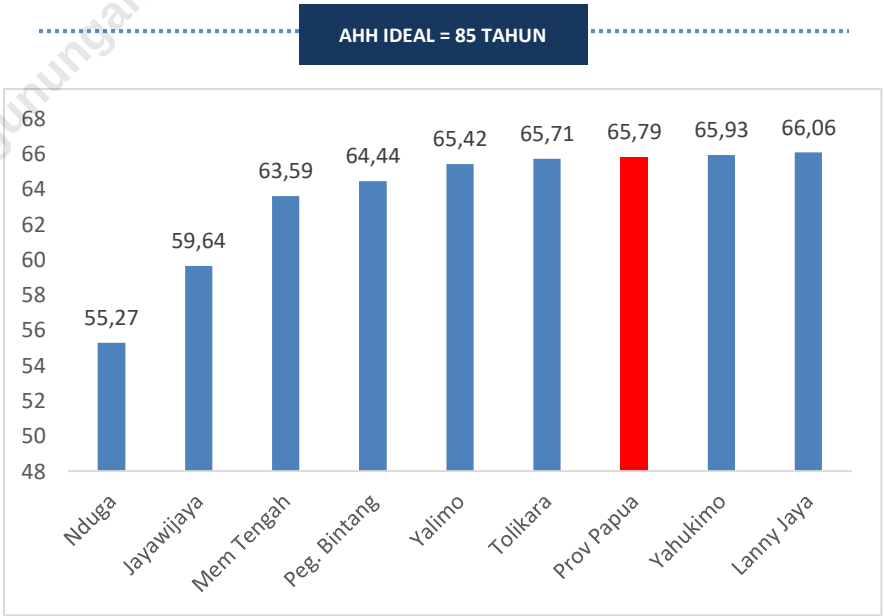

Sumber : BPS Provinsi Papua

Dari Gambar 3.3 di atas terlihat bahwa pada tahun 2019, Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki nilai AHH yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induk Jayawijaya. AHH tahun 2019 tertinggi untuk tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua ditempati oleh Kabupaten Mimika dengan AHH sebesar 72,32 tahun. AHH Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2020 menempati urutan ke-23 dari 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua dan berada di urutan yang sama dibanding tahun 2019. Sedangkan kabupaten dengan AHH terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Nduga dan Asmat yaitu berturut-turut sebesar 55,27 dan 58,05 tahun.

3.2 Dimensi Pengetahuan

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pendidikan. Pendidikan merupakan suatu investasi bagi pembangunan bangsa, sebab pendidikan sangat menentukan kualitas manusia. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah program wajib belajar 12 tahun yang mulai dicanangkan sejak tahun 2016, yaitu program wajib belajar pada tingkat SD sampai SMA menggantikan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pada tahun 1994. Meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal, akan tetapi program ini harus terus dikawal sehingga diharapkan mutu pendidikan menjadi lebih baik.

Dalam kaitannya dengan IPM, indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (*mean years of schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

3.2.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata Lama Sekolah memiliki batas maksimum 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2020 yang berusia 25 tahun keatas rata-rata telah menjalani pendidikan sampai kelas 2 SD saja

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 sebesar 2,81 tahun, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2,61 di tahun 2019. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang baru bisa bersekolah rata-rata sampai kelas 2 atau kelas 3 SD. Hal ini masih terkait dengan pendidikan yang belum dinikmati dengan baik. Hal yang sama juga dialami oleh daerah-daerah sekitar Pegunungan Bintang.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sekitarnya, 2020

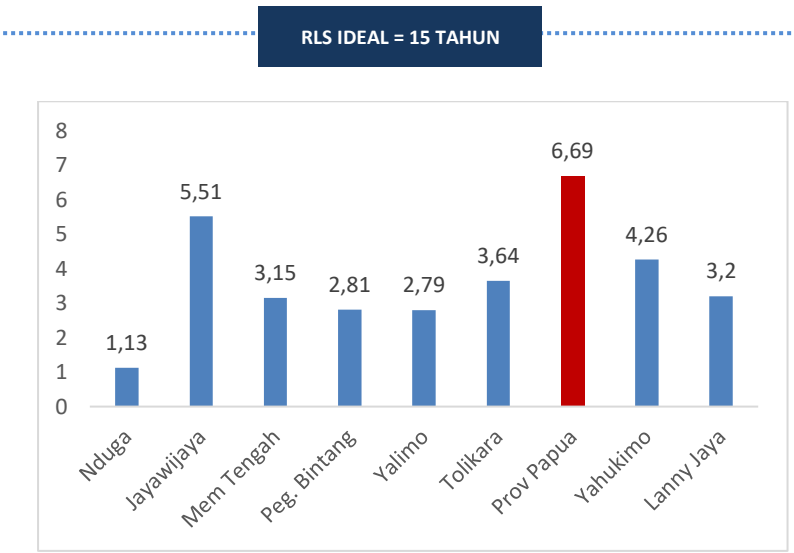

Sumber : BPS Provnsi Papua

Untuk indikator pendidikan, terjadi perbedaan yang cukup signifikan ketika kabupaten pemekaran dibandingkan dengan kabupaten induknya, termasuk angka rata-rata lama sekolah. Grafik diatas adalah gambaran Rata-rata Lama Sekolah dari wilayah pemekaran Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Pegunungan Bintang memang memiliki kondisi yang cukup berbeda ketika dibandingkan dengan kabupaten induknya. Inilah salah satu yang menyebabkan jauhnya jarak antara IPM Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Jayawijaya.

Pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020 tertinggi berada di Kota Jayapura, yaitu selama 11,56 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kota Jayapura pada tahun 2020 usia 25 tahun keatas telah bersekolah sampai jenjang kelas 2 hingga kelas 3 SMA. Sementara itu pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah terendah terjadi di Kabupaten Nduga yaitu 1,13 tahun atau setara dengan kelas 1 hingga kelas 2 SD dan Kabupaten Pegunungan Bintang sendiri menempati urutan ke-4 terendah (yaitu sebesar 2,81) setelah Kabupaten Yalimo yang memiliki nilai RLS sebesar 2,79. Adapun dua Kabupaten dengan RLS terendah adalah Nduga dan Pun

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 3.5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pegunungan Bintang 2018 - 2020

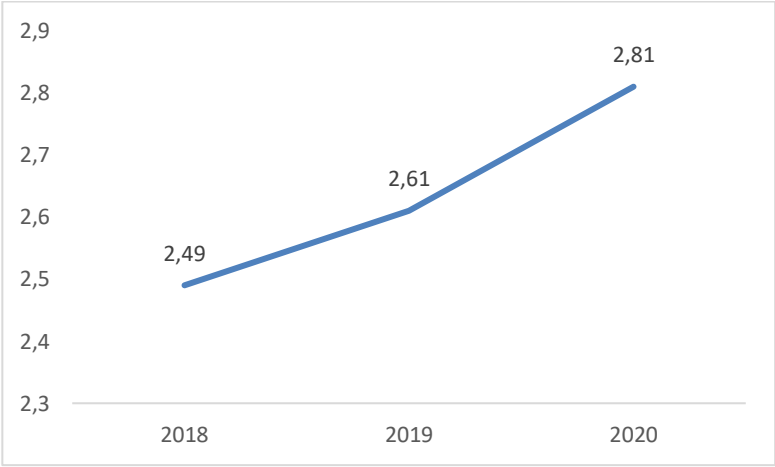

Sumber : BPS Provnsi Papua

Pada gambar di atas tampak bahwa Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Pegunungan Bintang dari tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 Rata-rata Lama Sekolah Pegunungan Bintang sebesar 2,49 kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 2,61 dan menjadi 2,81 pada tahun 2020. Salah satu cara untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah adalah dengan meningkatkan angka kelulusan baik pada jenjang SD, SMP, maupun SMA. Oleh karena itu pemerataan akses pendidkan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah setempat sehingga masyarakat dapat menikmati pendidikan dengan baik sampai ke daerah terpencil.

Secara umum, kenaikan angka rata-rata lama sekolah relatif lambat. Dalam dua tahun terakhir kenaikan rata-rata lama sekolah di Pegunungan Bintang meningkat 0.32 poin dari tahun 2018 ke tahun 2020. Bahkan dalam dua tahun terakhir, rata-rata lama sekolah Provinsi Papua juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 6,27 tahun pada 2017 dan 6,69 tahun pada 2020. Kabupaten yang mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir adalah Waropen yaitu 0,51 tahun dan Boven Digoel yaitu 0,47 tahun. Peningkatan paling rendah rata-rata lama sekolah ada di Kabupaten Yahukimo, Lanny Jaya, Puncak, Deiyai, dan Dogiyai yaitu masing-masing meningkat hanya 0,02 poin dalam dua tahun terakhir.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

3.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah,

Setiap anak usia 7 tahun keatas di Pegunungan Bintang pada tahun 2020 berpeluang menempuh pendidikan hingga kelas 6 SD – 1 SMP

harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Gambar 3.6 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sekitarnya, 2020

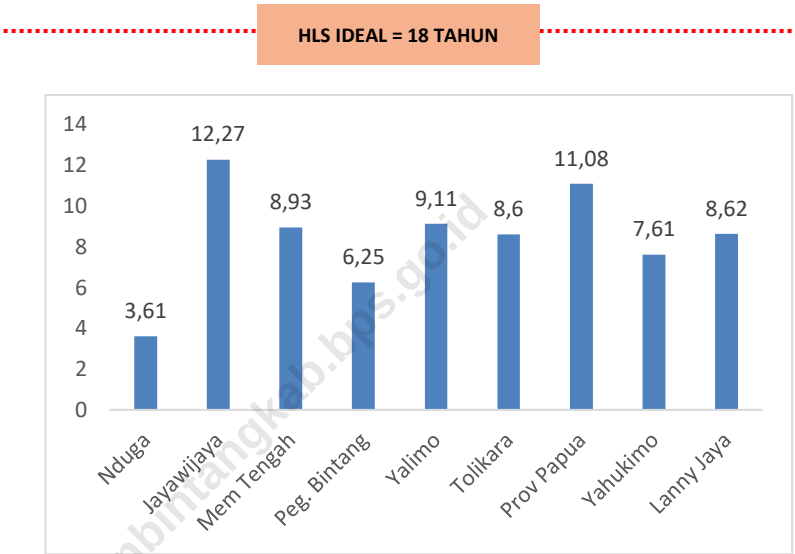

Sumber : BPS Provnsi Papua

Pada tahun 2020 nilai HLS Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 6,25 tahun, yang artinya seorang anak yang berusia 7 tahun di Pegunungan Bintang pada tahun 2020 diharapkan dapat merasakan pendidikan selama 6 tahun lebih atau kira-kira setara kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP. Untuk Provinsi Papua, pencapaian HLS pada tahun 2020 sebesar 11,08 yang artinya diharapkan anak usia 7 tahun di tahun 2019 dapat merasakan pendidikan selama hampir 11-12 tahun atau kira-kira sampai kelas 2-3 SMA. Sedangkan pada kabupaten induk Jayawijaya, angka HLS pada tahun 2019 sebesar 12,27 yang artinya anak usia 7 tahun di tahun 2019 diharapkan dapat merasakan Pendidikan selama hampir 12-13 tahun, atau dapat bersekolah hingga kelas 3 SMA hingga perguruan tinggi.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 3.7 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pegunungan Bintang, 2018 - 2020

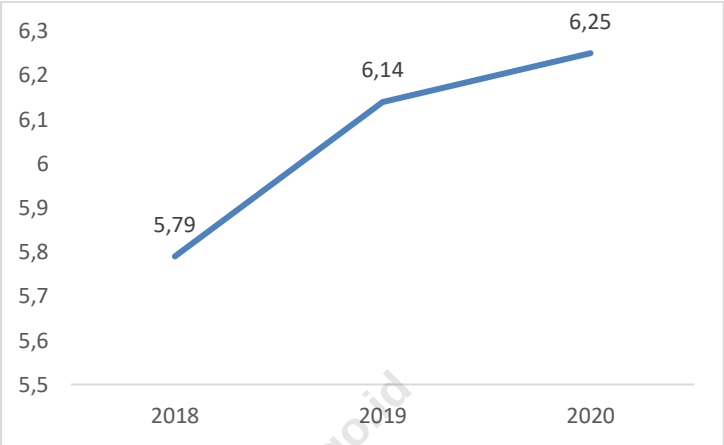

Sumber : BPS Provinsi Papua

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

Angka HLS Kabupaten Pegunungan Bintang meningkat dari 5,79 tahun pada 2018 menjadi 6,14 tahun pada 2019, dan mengalami peningkatan menjadi 6,25 pada tahun 2020. Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Dampak dari pembangunan fasiltas pendidikan tidak serta merta langsung dapat meningkatkan indikator Rata-rata Lama Sekolah. Dampak dari pembangunan tersebut baru dapat terlihat setelah beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu indikator Rata-rata Lama Sekolah memiliki volatilitas yang cukup lambat.

Pencapaian Angka HLS tahun 2020 Kabupaten Pegunungan Bintang menempati urutan ke-27 dari 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua atau berada di peringkat yang sama dengan tahun 2019. Angka tertinggi adalah Kota Jayapura yaitu 15,01 tahun dan Kabupaten Jayapura sebesar 14,20 tahun. Sementara kabupaten dengan HLS terendah adalah Nduga yaitu 3,61 tahun.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam penghitungan IPM, indikator Harapan Lama Sekolah menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) karena AMH dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebagai contoh kemampuan melek huruf (membaca) antara lulusan SD di wliayah A dengan lulusan sarjana di wilayah B

dianggap sama sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

3.3 Dimensi Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata Pengeluaran per Kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

3.3.1 Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan

Sebagai indeks komposit, IPM mengandung beberapa komponen yang merepresentasikan kondisi dan aspek yang terkait, salah satunya adalah komponen ekonomi yang diwakili oleh pengeluaran dan pendapatan. Mengingat data pendapatan sulit didapat, maka BPS dalam pelakasanaannya menggunakan pendekatan pengeluaran dalam kaitannya dengan aspek ekonomi.

Komponen pengeluaran ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional pada modul konsumsi. Jenis pengeluaran yang dihitung adalah pengeluaran untuk jenis makanan dan non makanan baik seminggu, sebulan dan setahun yang lalu. Rata-rata pengeluaran konsumsi riil ini merupakan komponen dalam penyusunan Indeks Standar Hidup Layak.

Pengeluaran rata-rata setiap penduduk Kab. Pegunungan Bintang pada tahun 2020 adalah Rp5.409.000.

Berbeda dengan komponen kesehatan dan pendidikan, komponen pengeluaran riil ini sangat sensitif terhadap waktu maupun kebijakan berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 3.8 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sekitarnya (dalam ribu rupiah), 2020

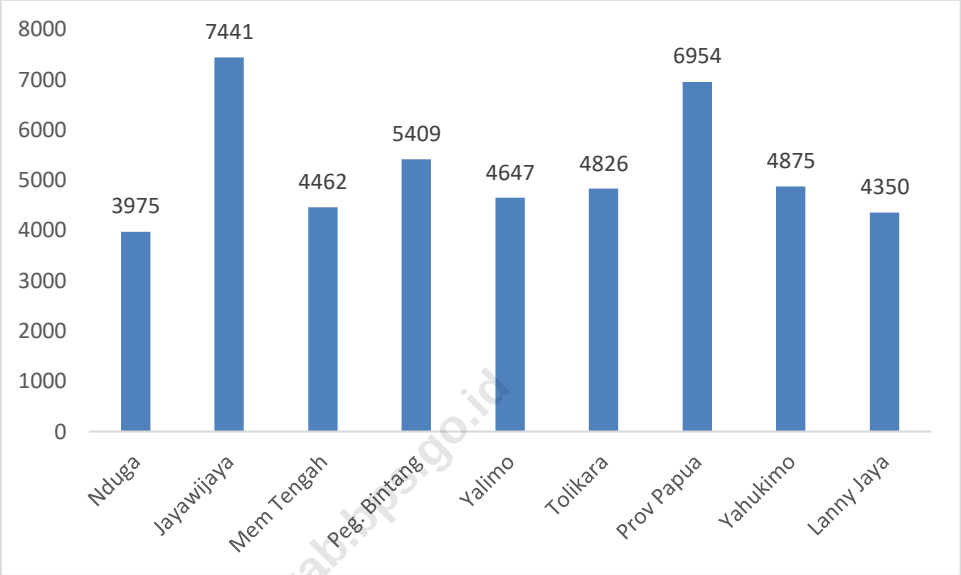

Sumber : BPS Provinsi Papua

Pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp 5.409.000,- per orang per tahun. Dibanding dengan pencapaian pengeluaran riil Provinsi Papua yang sebesar Rp 6.954.000,- dan kabupaten/kota lainnya di Papua, penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang berada di urutan ke-19 dari 29 Kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang kedepannya perlu lebih difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi baik dari segi laju pertumbuhannya maupun pemerataan pendapatan.

Pengeluaran riil Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 masih cukup jauh di bawah kabupaten induk Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya juga memiliki pengeluaran riil yang disesuaikan paling tinggi dibandingkan wilayah pemekarannya, bahkan lebih tinggi dari pengeluaran riil Provinsi Papua, yaitu sebesar Rp. 7.441.000,- per orang per tahun.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 3.9 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang, 2018 - 2020

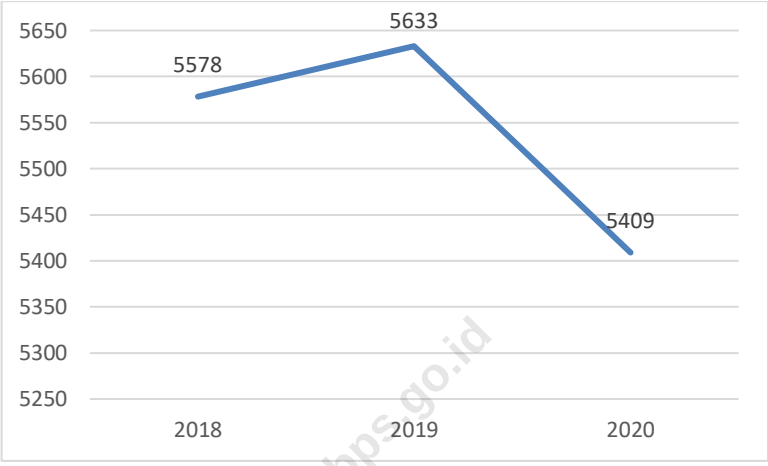

Sumber : BPS Provnsi Papua

https://pegunungan-bintang-kab.bps.go.id

Pengeluaran perkapita per tahun Pegunungan Bintang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dari sebesar Rp 5,633 juta pada tahun 2019 menjadi Rp 5,409 juta pada tahun 2020. Nilai pengeluaran per kapita memberikan sedikit gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya pengeluaran yang meningkat tidak bisa serta merta dimaknai dengan meningkatnya kesejahteraan secara empirik, hal itu dikarenakan adanya unsur inflasi/kenaikan harga yang juga cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Adapun dua kabupaten/kota dengan pencapaian angka rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi pada tahun 2020 adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika yaitu masing-masing Rp 14.763.000 dan Rp. 11.431.000 per orang per tahun. Sementara pencapaian angka rata-rata pengeluaran riil penduduk terendah terjadi di Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya yaitu Rp 3.975.000 dan Rp. 4.350.000 per orang per tahun.

3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pegunungan Bintang

IPM dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Namun sejak tahun 2014 terjadi perubahan metode pengitungan IPM. Mulai tahun 2014 penghitugan IPM sudah menggunakan metode baru. Ada beberapa kondisi dan catatan yang harus diperhatikan ketika ingin membandingkan kondisi IPM mulai tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu efek dari perubahan metodologi penghitungan IPM adalah penurunan nilai IPM hampir di tiap kabupaten/kota. Untuk mengantisipasi berbagai pertanyaan terkait penurunan nilai IPM di tahun 2014, dilakukan juga penghitungan nilai IPM untuk tahun-tahun sebelumnya mengunakan metode baru.

IPM Kab. Pegunungan Bintang tahun 2019 adalah 45,21 menempati peringkat ke 27 dari 29 Kab/Kota se Papua dan masuk dalam kategori pembangunan rendah

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 3.10 Perkembangan Pencapaian IPM Kabupaten Pegunungan Bintang, 2010 – 2020

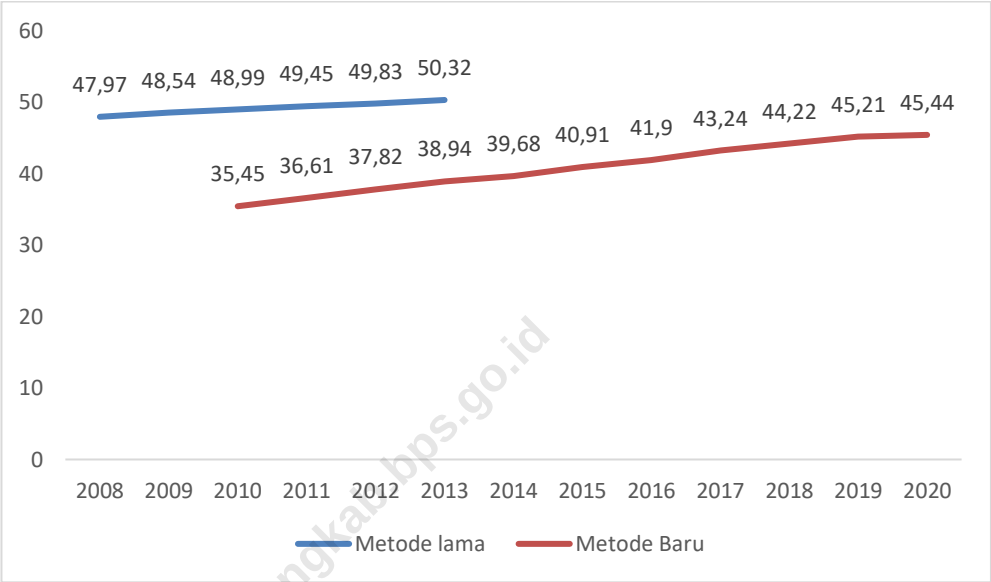

Sumber : BPS Provnsi Papua

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Pegunungan Bintang tercermin pada angka IPM. Selama sembilan tahun terakhir, IPM Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami peningkatan dari 35,45 pada tahun 2010 menjadi 45,44 di tahun 2020. Dengan pencapaian tersebut, maka menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kabupaten Pegunungan Bintang masih masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia rendah dengan angka capaian IPM kurang dari 60,00.

Perbandingan dengan Kabupaten Lain

Gambar 3.11 Pencapaian IPM Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pemekaran Kabupaten Jayawijaya Lainnya, 2020

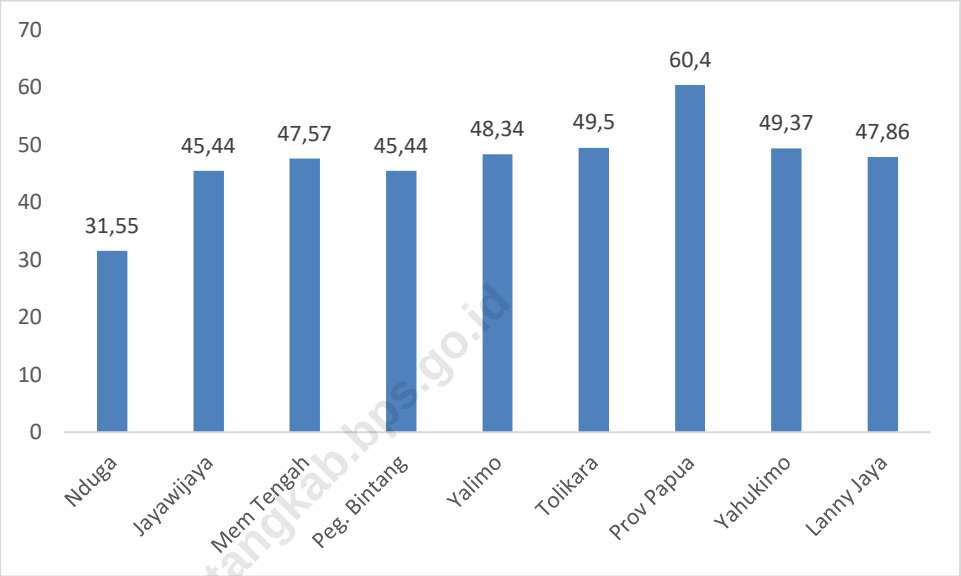

Sumber : BPS Provnsi Papua

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Jayawijaya sebagai kabupaten induk memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pemekarannya, diikuti oleh Kabupaten Tolikara. Dari seluruh wilayah pemekaran Kabupaten Jayawijaya (7 kabupaten), dengan metode penghitungan baru, semuanya masih berada dikategori pembangunan rendah.

Apabila dirinci menurut Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Papua, pencapaian IPM tertinggi terjadi pada Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika, dengan pencapaian masing-masing sebesar 79,94 dan 74,19. Berdasarkan besaran nilai IPM pada tahun 2020 ini, ada 4 kabupaten yang termasuk dalam kategori pembangunan manusia tinggi, 8 kabupaten yang masuk dalam ketegori pembangunan manusia sedang dan 17 kabupaten yang masuk di kategori rendah.

Gambar 3.12 Pencapaian IPM Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020

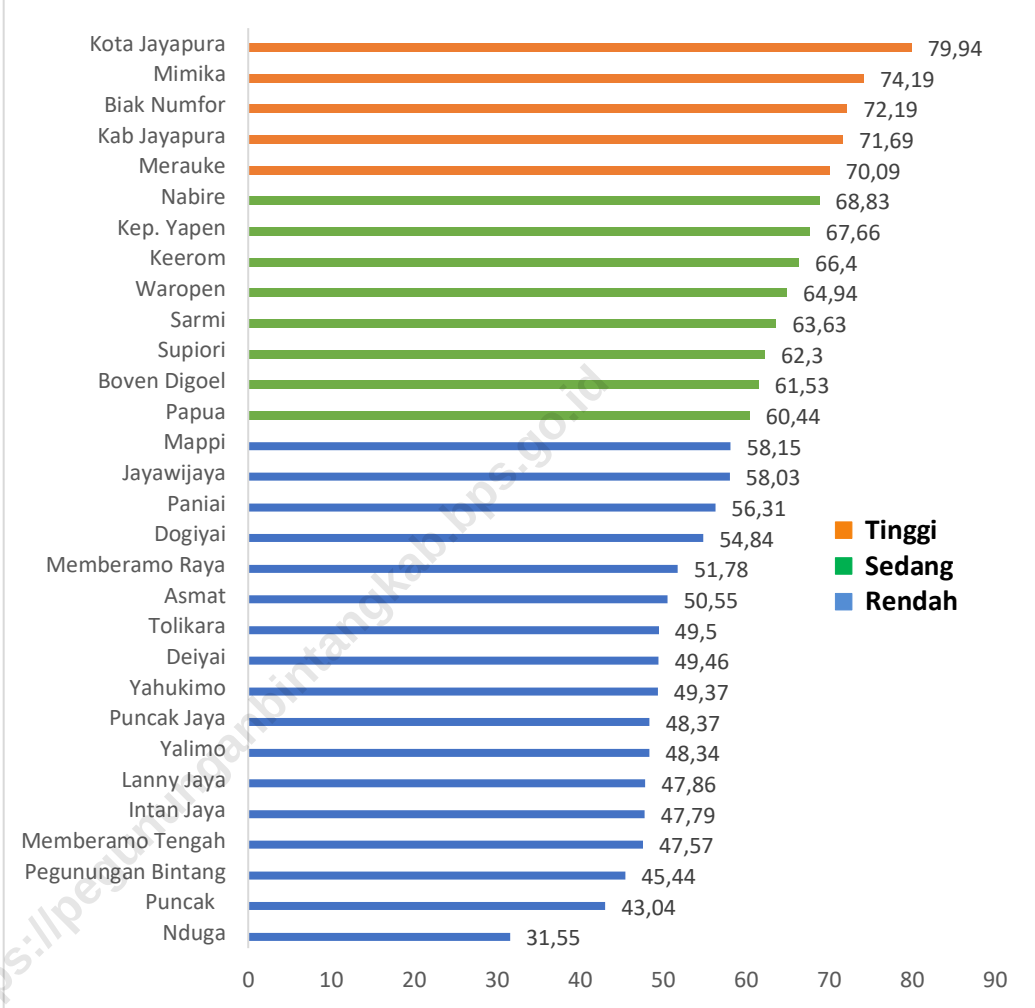

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Sumber : BPS Provnsi Papua

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

4

Hasil pembangunan manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang selain tercermin dari indikator agregat IPM juga digambarkan dari pencapaian indikator tunggal yang terkait dengan kesejahteraan penduduk baik dibidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan. Pemantauan indikator-indikator tunggal tersebut sangat bermanfaat untuk mengenali aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan IPM.

4.1 Kependudukan

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, dalam pelaksanaan pembangunan. Selain berperan sebagai pelaksana pembangunan, penduduk juga menjadi sasaran pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, perkembangan penduduk harus diarahkan pada peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas serta pengarahan mobilitasnya, sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang dapat menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk.

Tujuan utama pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan penduduk dalam berbagai bidang

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

4.1.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk

Penduduk, di samping sebagai konsumen dalam pembangunan, juga merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Dalam konteks sebagai potensi SDM, penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Peranan penduduk dalam pembangunan akan berhasil apabila memiliki kemampuan dalam menjawab semua tantangan dalam pembangunan baik posisinya sebagai pengelola sumber daya alam maupun sebagai pengguna/konsumen sumber daya alam.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Distrik, 2020

NO	DISTRIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IWUR	1 382	1231	2613
2.	KAWOR	679	590	1269
3.	TARUP	782	656	1438
4.	AWINBON	319	295	614
5.	OKSIBIL	2806	1878	4684
6.	PEPERA	719	659	1378
7.	ALEMSOM	1208	1124	2332
8.	SERAMBAKON	1183	1113	2296
9.	KOLOMDOL	785	593	1379
10.	OKSOP	1195	1105	2300
11.	SEBANG	375	351	726
12.	OK BAPE	469	491	960
13.	OK AON	717	713	1430
14.	BORME	1813	1462	3275
15.	BIME	2322	2287	4609
16.	EPUMEK	2525	2239	4764
17.	WEIME	1516	1420	2936
18.	PAMEK	1156	1054	2210
19.	NONGME	1292	1128	2420
20.	BATANI	838	801	1639
21.	OKBI	1157	1126	2283

https://pegunganbintangkab.bps.go.id

22.	ABOY	577	575	1152
23.	OKBAB	2043	1985	4028
24.	TEIRAPLU	867	715	1582
25.	YEFTA	382	321	703
26.	KIWIROK	1611	1544	3155
27.	KIWIROK TIMUR	1145	1142	2287
28.	OKHIKA	776	769	1545
29.	OKLIP	982	927	1909
30.	WARASAMO	1372	1287	2659
31.	BATOM	2594	2334	4928
32.	MURKIM	420	390	810
33.	MOFINOP	716	617	1333
34.	OKBEMTA	1589	1351	2940
PEGUNUNGAN BINTANG		**40312**	**36274**	**76586**

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun 2020 Kabupaten Pegunungan Bintang berjumlah 76.586 jiwa, yang terdiri dari 40.312 jiwa penduduk laki-laki dan 36.274 jiwa penduduk perempuan. Secara absolut, jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami kenaikan dari tahun 2019, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,05 persen.

Jumlah penduduk Kab. Pegunungan Bintang tahun 2020 menempati posisi 19 dari seluruh kab/kota se Papua

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2020

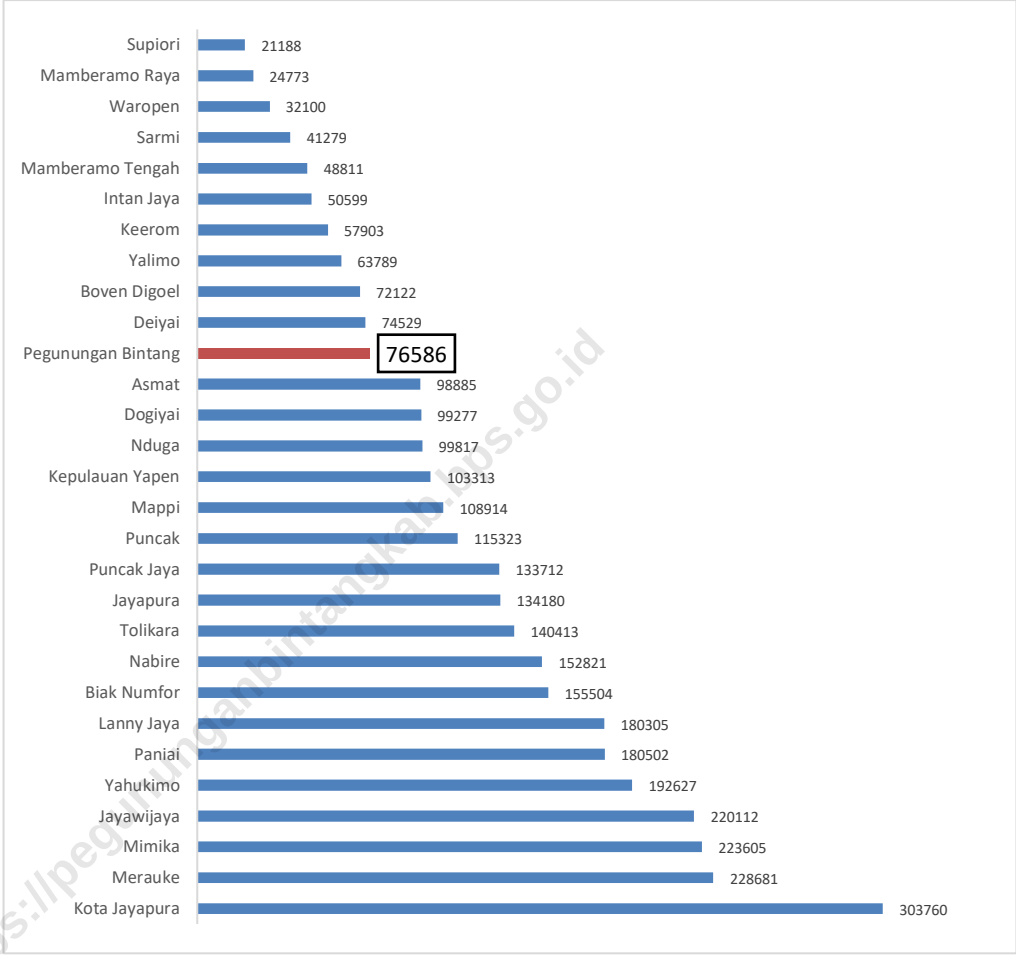

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020

Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari 34 distrik dan penduduknya relatif tersebar secara merata di beberapa distrik. Pada tahun 2020 penduduk paling banyak tinggal di Distrik Batom, yaitu sebanyak 4.928 jiwa atau 6,43 persen dari seluruh penduduk Pegunungan Bintang. Sedangkan Distrik Oksibil sebagai ibukota kabupaten menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 4.684 jiwa atau sekitar 6,11 persen. Meskipun memiliki jumlah distrik yang relatif lebih banyak, namun dibanding jumlah penduduk Kabupaten/Kota seluruh Papua, jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang menempati urutan ke-19 dari 29 kabupaten/kota yang ada, yaitu sekitar 2,22 persen dari total penduduk Papua pada tahun 2020.

Jumlah penduduk terbesar ada di Distrik Batom dan terendah ada di Distrik Awinbon

4.1.2 Komposisi Penduduk

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut jenis kelamin (*sex ratio*) dan angka ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* didefinisikan sebagai perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat penting artinya untuk melihat keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan tersebut akan mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta keberlangsungan reproduksi. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan angka di atas 100 yaitu 111,13 artinya untuk setiap 100 wanita terdapat 111 sampai 112 laki-laki. Dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Pegunungan Bintang 11 (sebelas) hingga 12 (dua belas) persen lebih banyak dari penduduk perempuan.

Jumlah penduduk laki-laki di Pegunungan Bintang lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Dilihat sebarannya per distrik, terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan di semua distrik, kecuali di Distrik Ok Bape yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki (*sex ratio* dibawah 100). Distrik yang mempunyai *sex ratio* paling besar pada tahun 2020 adalah Distrik Oksibil yaitu sebesar 149,41 kemudian disusul Distrik Kolomdol sebesar 132,15.

Gambar 4.2 *Sex Ratio* Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang menurut Distrik, 2020

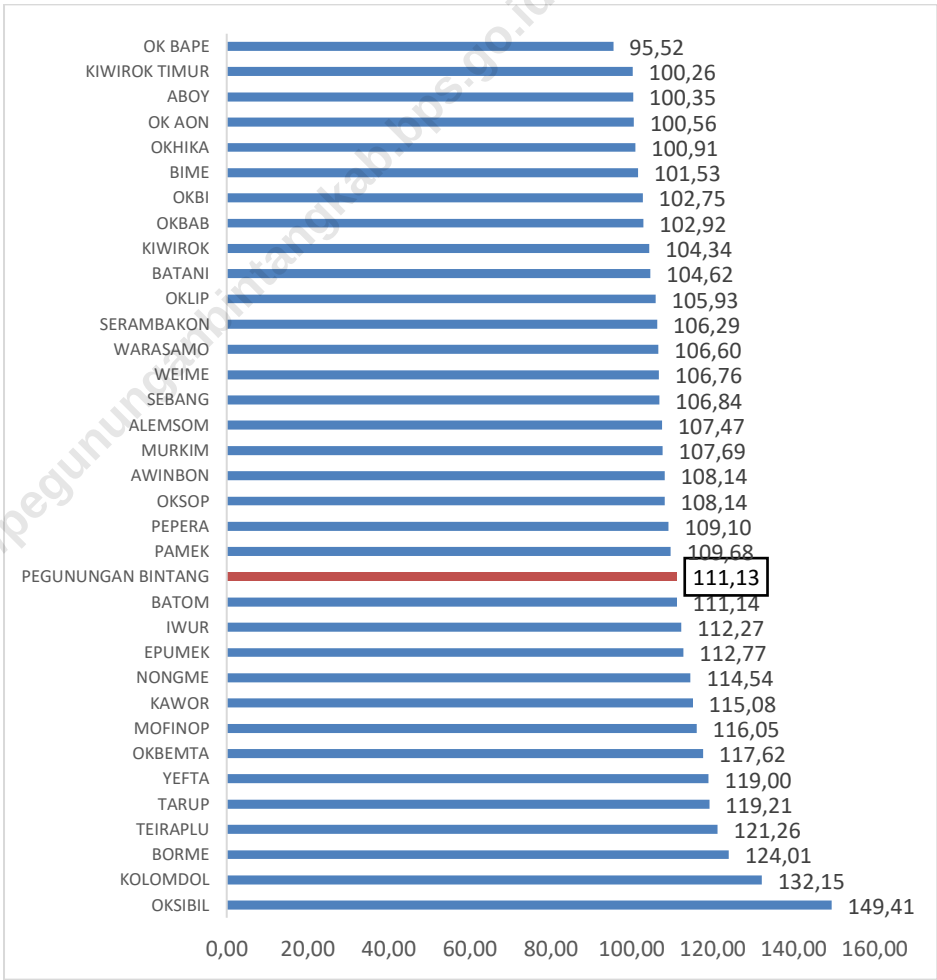

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020 (diolah)

Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah suatu diagram yang menunjukkan komposisi jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai piramida. Piramida penduduk terdiri dari garis/koordinat vertikal dan horizontal. Koordinat vertikal dalam piramida penduduk menunjukkan kelompok umur, sedangkan koordinat horizontal menunjukkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang dipisah antara laki-laki dan perempuan, dimana sisi yang satu adalah penduduk laki-laki dan sedangkan sisi lain adalah penduduk perempuan.

Piramida Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 masuk kategori Piramida Penduduk Muda

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 4.3 Piramida Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

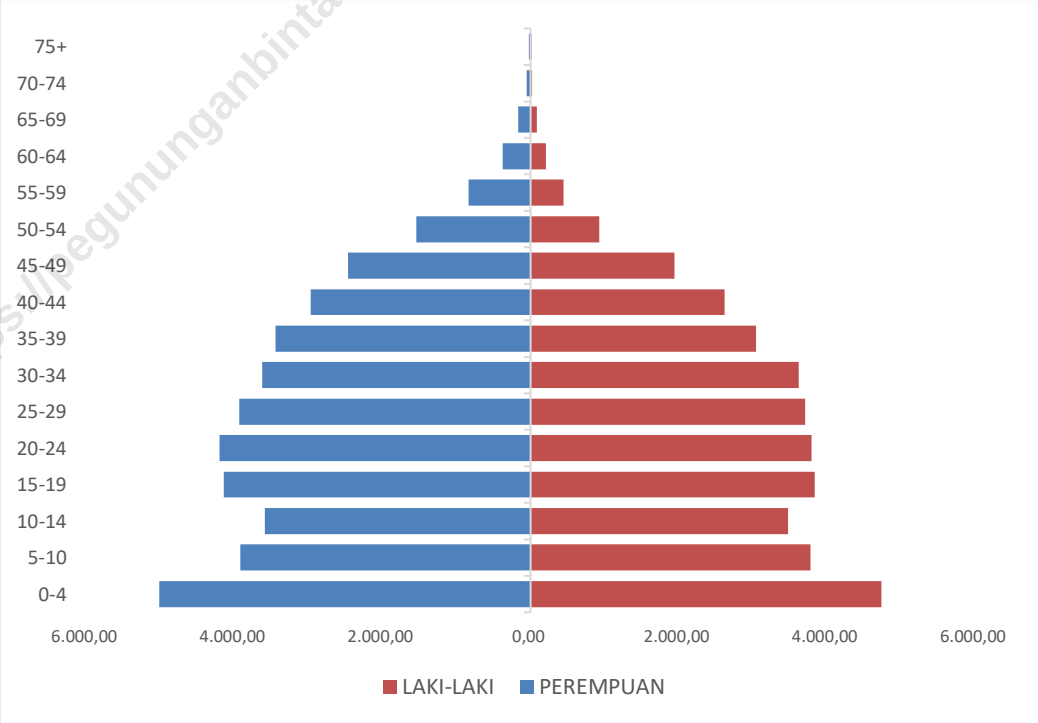

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020 (diolah)

Dari gambar di atas tampak bahwa piramida penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 masuk dalam kategori piramida penduduk muda (*expansive*). Piramida penduduk muda mempunyai ciri-ciri:

1. Mayoritas penduduknya berada pada kelompok usia muda.
2. Kelompok usia tua jumlahnya sedikit.
3. Tingkat kelahiran bayi tinggi.
4. Pertumbuhan penduduk tinggi.

Kelompok piramida penduduk usia muda membutuhkan perhatian lebih dalam hal penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan sehingga bisa menghasilkan manusia yang berpendidikan, sehat dan produktif.

Selain *sex ratio* dan piramida penduduk, pengelompokan penduduk berdasarkan umur produktif dan tidak produktif juga sangat penting. Semakin banyak penduduk usia produktif yang berpendidikan berarti semakin mampu suatu daerah untuk mengembangkan aktifitas ekonominya. Indikator yang biasa digunakan adalah indikator *dependency ratio* yang menggambarkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif yaitu kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas terhadap penduduk usia produktif yaitu kelompok umur 15-64 tahun.

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di suatu daerah. Pembangunan di bidang kependudukan dikatakan berhasil jika nilai *depency ratio*-nya rendah. Semakin rendah nilai *dependency ratio* berarti semakin rendah angka beban ketergantungan terhadap penduduk usia produktif sehingga memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk terus meningkatkan kualitas dirinya.

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

Tabel 4.2 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)	(3)
0 -14	24 518	47,41
15 -64	51 704	
65 +	364	0,7
Pegunungan Bintang	**76 586**	**48,11**

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020 (diolah)

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Pegunungan Bintang pada periode tahun 2020 cukup besar, yaitu untuk setiap 100 penduduk usia produktif pada tahun 2020 harus menanggung sekitar 48-49 penduduk usia tidak produktif yang berusia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun. Terkait dengan IPM, tingginya angka ketergantungan akan mengurangi keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya karena harus menanggung beban orang yang (sudah) tidak produktif lagi.

Dari 100 orang usia produktif harus menanggung sekitar 48-49 orang tidak produktif

4.1.3 Status dan Usia Perkawinan Pertama Wanita

Gambar 4.4 Status Perkawinan Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

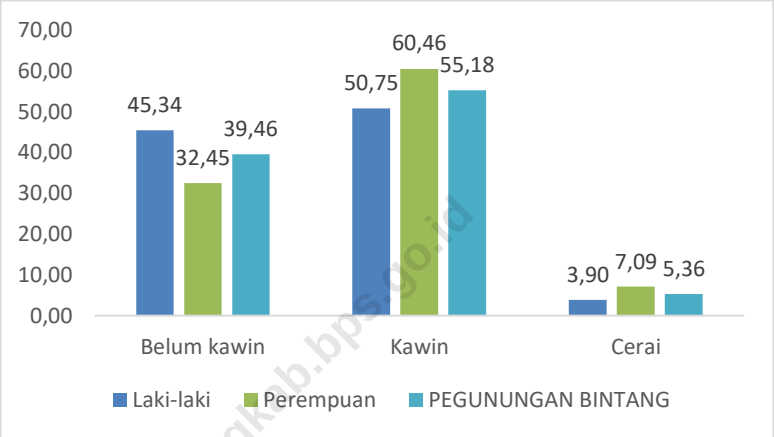

Sumber : Susenas Maret Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

ih dari setengah penduduk usia 10 tahun ke atas Kabupaten Pegunungan Bintang berstatus kawin. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang berstatus kawin lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki dan sebaliknya, persentase penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin lebih besar daripada penduduk perempuan. Persentase penduduk perempuan yang berstatus kawin sebesar 60,46 persen dan penduduk laki-laki sebesar 50,75 persen, sedangkan yang belum kawin untuk laki-laki sebesar 45,34 persen dan perempuan sebesar 32,45 persen. Sama halnya dengan penduduk yang berstatus kawin, penduduk perempuan yang berstatus cerai yaitu sebesar 7,09 persen, lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang memiliki persentase sebesar 3,9 persen.

Penduduk berstatus kawin lebih banyak dari penduduk yang belum kawin dan yang cerai

Selain status kawin, Usia Kawin Pertama juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki pengaruh terhadap tinggi ataupun rendahnya angka fertilitas.

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

Oleh sebab itu, Usia Kawin Pertama lebih dititik-beratkan kepada perempuan yang memiliki kaitan dengan fertilitas/reproduksi manusia. Semakin muda usia kawin pertama seorang perempuan maka kemungkinan semakin besar tingkat fertilitasnya karena semakin panjang masa reproduksinya.

Selain itu usia kawin pertama juga memberikan resiko bagi kesehatan perempuan serta memengaruhi keselamatan janin yang dikandung. Semakin rendah usia wanita untuk menikah, semakin beresiko terhadap keselamatan janin yang dikandungnya, karena organ-organ reproduksinya belum berkembang secara sempurna.

Gambar 4.5 Persentase Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Kawin Pertama dan Rata-rata Usia Kawin Pertama Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

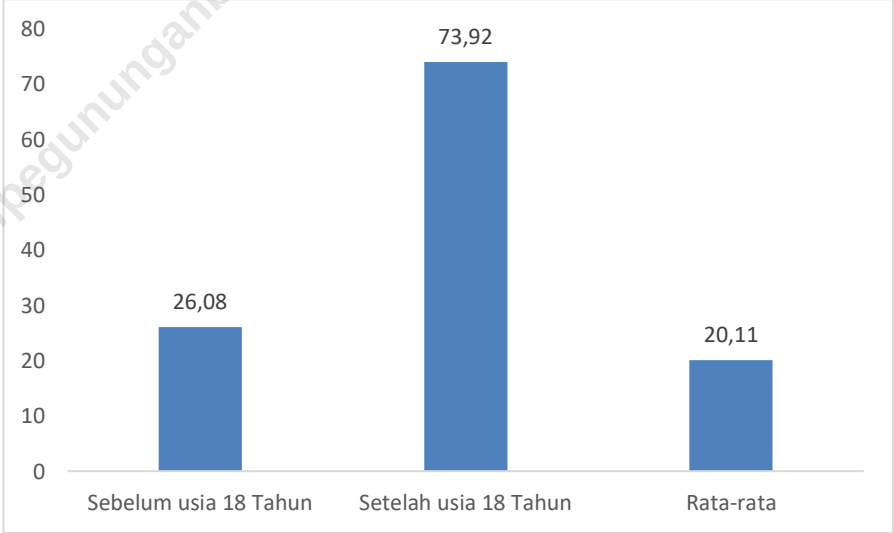

Sumber : Susenas Maret Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

Berdasarkan data Susenas menunjukan bahwa masih terdapat perempuan yang melakukan perkawinan di usia muda (18 tahun ke bawah), walaupun persentasenya masih lebih rendah dari wanita yang melakukan perkawinan pertama setelah usia 18 tahun. Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin yang melakukan perkawinan pada usia 18 tahun ke bawah sebesar 26,08 persen.

Usia Kawin Pertama perempuan di Kab. Pegunungan Bintang tahun 2020 tergolong muda

Masih adanya penduduk yang menikah pada usia muda harus mendapat perhatian khusus pemerintah daerah agar pada tahun-tahun mendatang angkanya dapat diturunkan. Salah satu program yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan resiko yang diakibatkan menikah pada usia muda.

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

4.1.4 Pemakaian Alat/Cara KB

Pemakaian alat KB sangat berperan dalam menurunkan angka fertilitas. Semakin banyak peserta KB, angka fertilitas akan semakin turun. Berdasarkan data hasil Susenas 2020, wanita usia subur (15-49 tahun) yang pernah kawin di Kabupaten Pegunungan Bintang yang tidak pernah menggunakan alat/cara KB masih memiliki persentase yang begitu besar, yaitu mencapai 89,77 persen. Dengan demikian, tingkat penggunaan KB oleh wanita usia subur pernah kawin di Pegunungan Bintang masih sangat rendah. Persentase wanita usia subur pernah kawin yang pernah menggunakan alat/cara KB sekitar 3,64 persen dan 6,59 persen yang sedang menggunakan alat KB.

Sebagian besar perempuan di Pegunungan Bintang tidak pernah menggunakan alat KB

Sementara di kabupaten induk Jayawijaya, sekitar 75,11 persen wanita usia subur yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Prevalensi pemakaian alat KB di Kabupaten Pegunungan Bintang lebih rendah dari kabupten induknya. Masih

banyaknya penduduk yang tidak menggunakan KB menjadi salah satu penyebab laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup besar di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Gambar 4.6 **Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, 2020**

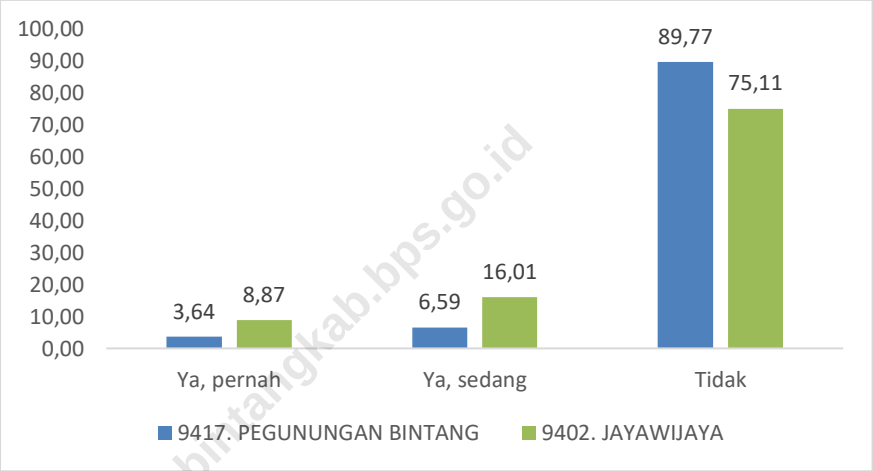

Sumber : Susenas Maret BPS Provinsi Papua, 2020

Dilihat menurut keefektifannya alat kontrasepsi dibedakan menjadi dua yaitu alat kontrasepsi mantap (alat kontap) dan tidak mantap. Alat kontrasepsi mantap adalah alat kontrasepsi yang masa efektifnya panjang seperti vasektomi dan tubektomi yang masa efektifnya seumur hidup. Alat kontrasepsi mantap lainnya yang efektif beberapa tahun adalah spiral/IUD dan susuk KB/norplant. Alat kontrasepsi ini mempunyai resiko kegagalan relatif kecil dibandingkan alat yang lain. Sedangkan alat kontrasepsi lainnya di katagorikan sebagai alat kontrasepsi tidak mantap.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

4.2 Pendidikan

Sumber daya manusia berperan penting terhadap kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan sumber daya manusia demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas melalui bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan formal maupun informal.

Pada tahun 2018 Sudah lebih dari setengah dari penduduk Kab. Pegunungan Bintang yang bisa membaca dan menulis

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan sampai saat ini masih melanjutkan program wajib belajar 6 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

4.2.1 Angka Buta Huruf dan Melek Huruf

Gambar 4.7 Angka Buta Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, 2020

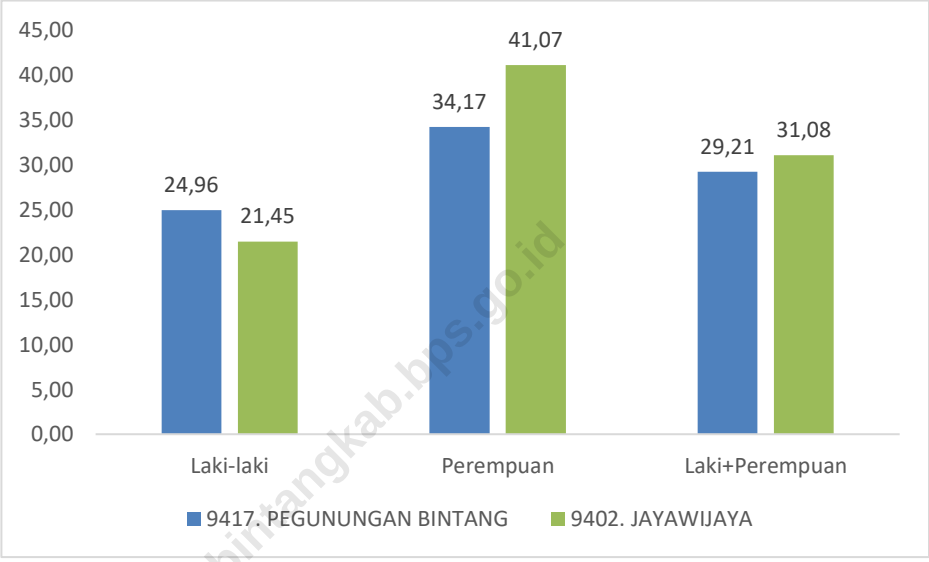

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Salah satu keberhasilan pendidikan adalah menurunnya angka buta huruf atau tingkat buta huruf. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan untuk mencapai hidup sejahtera.

Pada tahun 2020 tingkat buta huruf Kabupaten Pegunungan Bintang lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Jayawijaya. Sekitar 29,21 persen penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang belum bisa membaca dan menulis. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya tingkat buta huruf lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki, dimana masing-masing adalah sebagai berikut 34,17 dan 24,96.

Kebalikan dari Angka Buta Huruf, Angka Melek Huruf menggambarkan kemampuan membaca dan menulis penduduk di suatu wilayah. Tercatat pada tahun 2020 persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang melek huruf dikabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 70,79 persen. Sedangkan angka melek huruf Kabupaten Jayawijaya tahun 2020 sebesar 68,92 persen. Dibanding kabupaten induknya, capaian angka melek huruf Kabupaten Pegunungan Bintang masih lebih tinggi. Diperlukan kerja keras dari pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk lebih memperhatikan pembangunan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, untuk dapat terus meningkatkan angka melek huruf Kabupaten Pegunungan Bintang maka pembangunan dibidang pendidikan harus lebih menjadi prioritas utama agar tujuan pemberantasan buta aksara dapat tercapai.

Keberadaan guru Indonesia Mengajar, Indonesia Cerdas, SM3T, dan guru honorer signifikan dalam pemberantasan buta aksara

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 4.8 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, 2020

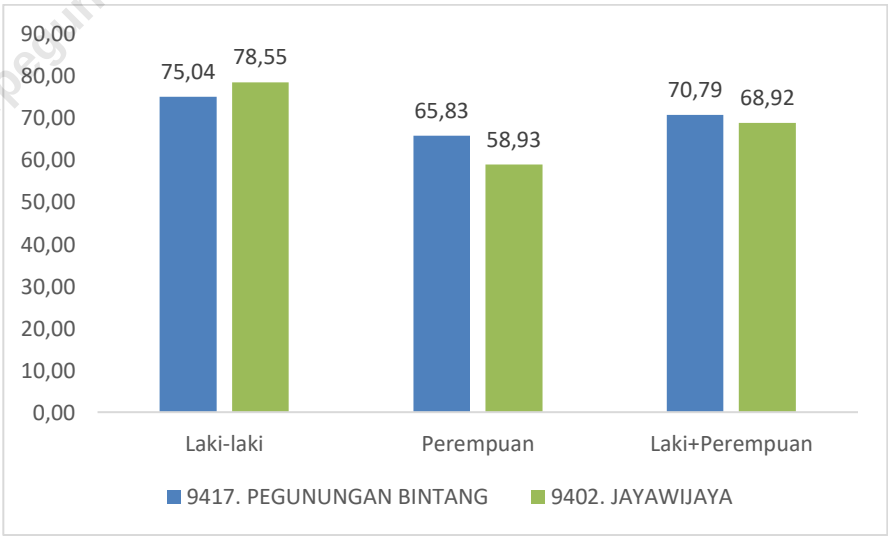

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

Angka melek huruf akan semakin meningkat nilainya jika pemberantasan buta huruf di Kabupaten Pegunungan Bintang terus digalakkan, tidak hanya difokuskan pada kelompok umur 15 tahun keatas, namun juga di usia belajar yaitu antara 9-15 tahun, karena pada golongan umur tersebut masih banyak didapati buta huruf. Program-program bidang pendidikan yang kiranya mendesak untuk dilakukan adalah program-program kejar paket, pembangunan sekolah-sekolah menengah hingga ke semua distrik serta penyediaan tenaga pendidik baik guru tetap maupun guru honorer, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sebagai mana mestinya sehingga dapat meningkatkan status pembangunan manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang khususnya dibidang pendidikan.

4.2.2 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang dalam pendidikan sekolah dasar hingga menengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengkaji partisipasi sekolah merupakan suatu indikator proses yang menunjukkan proses atau bagaimana program pendidikan diimplementasikan di masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mengukur partisipasi sekolah suatu penduduk adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partispasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

4.2.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan Indikator yang mengukur proporsi anak yang sedang bersekolah menurut kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah.

Gambar 4.9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

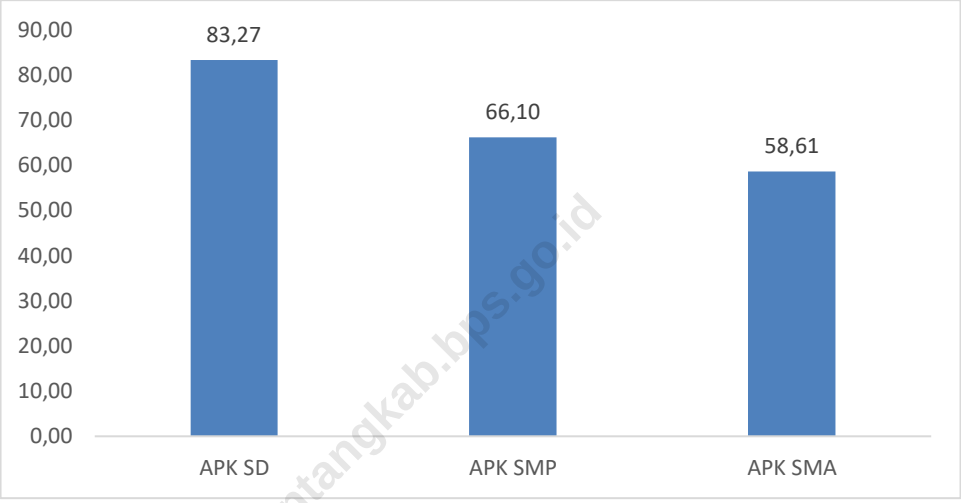

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

https://pegunungganbintangkab.bps.go.id

Dari Gambar 4.9, Tercatat pada tahun 2019 nilai APK di Kabupaten Pegunungan Bintang pada jenjang sekolah dasar sebesar 83,27. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 83,27 persen murid sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat tanpa melihat umurnya, baik yang berumur 7-12 tahun, maupun yang lebih ataupun kurang. Begitu pula APK untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat sebesar 66,1 dan untuk jenjang SMA/sederajat sebesar 58,61. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil dari anak berusia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP dan SMA dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan dibawah atau diatasnya, atau mungkin juga mereka tidak sekolah lagi. Oleh karena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator APS dan APM.

4.2.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi murid pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat waktu pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil dari nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Gambar 4.10 Angka Partisipasi Murni (APM) Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

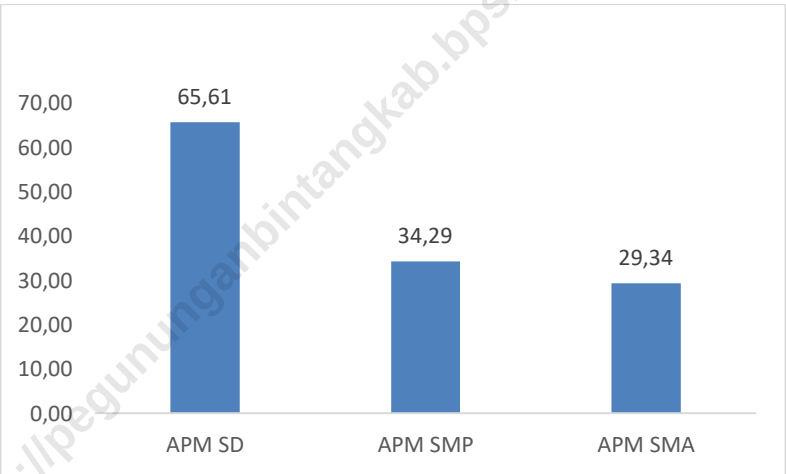

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

APK jenjang SD/sederajat pada tahun 2020 sebesar 83,27 persen sedangkan APM SD/sederajat hanya sebesar 65,61 persen. Ini menunjukkan bahwa murid SD/sederajat yang berumur 7-12 tahun terdapat sebanyak 65,61 persen. Sedangkan selisih antara APK dan APM sebesar 17,66 persen yang memiliki arti bahwa 17,66 persen ada di antara murid SD/sederajat yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Tabel 4.3 APK dan APM Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi		Selisih APK-APM
	APK	APM	
SD	83,27	65,61	17,66
SMP	66,1	34,29	31,81
SMA	58,61	29,34	29,27

SUMBER : SUSENAS MARET, BPS PROVINSI PAPUA

Menurut nilai APK, Masih ada murid yang bersekolah di luar jenjang pendidikan yang seharusnya jika dilihat dari usianya

Pada jenjang SMP/sederajat, APK sebesar 66,1 persen sedang APM sebesar 34,29 persen yang berarti bahwa hanya 34,29 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai murid SMP/sederajat dan sisanya bisa terserap dijenjang pendidikan SD, SMU, atau bahkan tidak sekolah lagi. Selisih antara APK dan APM SMP/sederajat sebesar 31,81 persen yang artinya diantara murid SMP/sederajat, 31,81 persen diantaranya, berumur kurang dari 13 tahun atau lebih dari 15 tahun.

APK jenjang SMA/sederajat pada tahun 2020 sebesar 58,61 persen, sedangkan APM SMA/sederajat hanya sebesar 29,34 persen. Ini menunjukkan bahwa murid SMA/sederajat yang berumur 16-18 tahun terdapat sebanyak 29,34 persen. Sementara selisih APK dan APM untuk jenjang SMA sebesar 29,27 persen, yang artinya diantara murid SMA/sederajat, 29,27 persen diantaranya, berumur kurang dari 16 tahun atau lebih dari 18 tahun.

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

4.2.2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Partisipasi anak usia sekolah yang sedang bersekolah tergolong rendah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. APS menggambarkan berapa banyak penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa melihat jenjang pendidikannya). Selain itu, APS merupakan Indikator yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun dikatakan berhasil jika nilai APS usia 7-12 tahun sebesar 100 persen dan APS usia 13-15 tahun sebesar 100 persen atau dengan kata lain semua anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sedang bersekolah (tanpa melihat jenjang pendidikannya).

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 4.11 Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya Tahun 2020

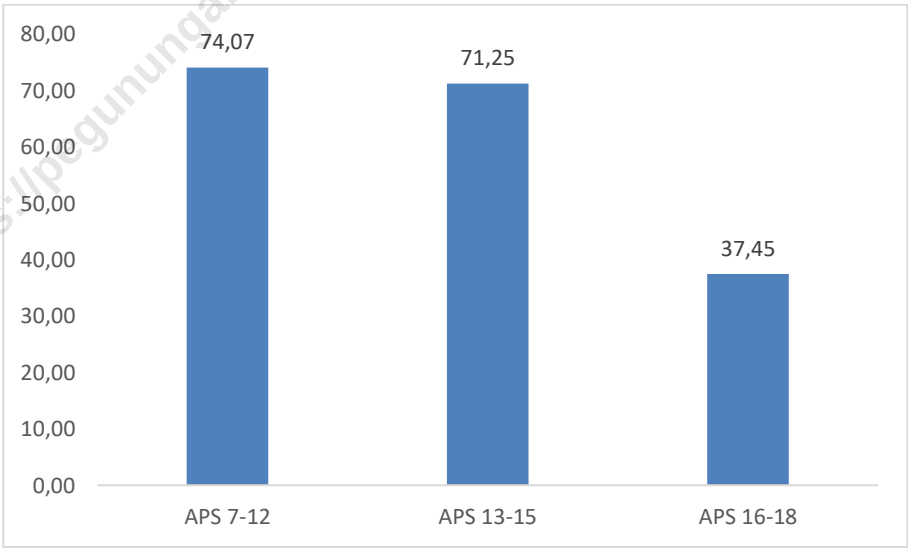

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

Berdasarkan data Susenas 2020, capaian APS Kabupaten Pegunungan Bintang yang berdiri sejak tahun 2003, masih belum memenuhi target wajib belajar 9 tahun. Gambaran ini tercermin dari nilai APS yang masih relatif rendah. Tercatat pada tahun 2020 nilai APS usia 7-12 tahun sebesar 74,07; APS usia 13-15 tahun sebesar 71,25; dan APS usia 16-18 tahun sebesar 37,45.

Masih banyaknya anak usia sekolah yang belum terserap di berbagai tingkat pendidikan perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk lebih menitikberatkan pembangunan di sektor pendidikan. Beberapa cara untuk mempercepat pembangunan di bidang pendidikan antara lain, memperluas pembangunan infrastruktur pendidikan sampai ke kampung, penambahan jumlah guru baik guru honorer maupun tetap, dan kerjasama dengan pemuka agama (pendeta) untuk dapat mengajarkan keterampilan baca tulis masyarakat di sekitarnya. Sehingga diharapkan Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mengejar ketertinggalan capaian pembangunan manusia dengan kabupaten-kabupaten lainnya.

Keterbatasan gedung sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar merupakan masalah utama bidang pendidikan di Kab Pegunungan Bintang

APS dikombinasikan dengan APM dapat menunjukkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh penduduk dengan usia pendidikan tertentu. Selain itu, APS juga dapat menggambarkan penduduk pada usia pendidikan yang tidak bersekolah baik karena belum pernah bersekolah atau karena *drop out* sehingga tentunya hal ini dapat semakin memperjelas arti APK. Keberadaan penduduk yang terkategori dalam usia pendidikan namun tidak bersekolah baik karena belum pernah sekolah maupun karena *droup out* merupakan permasalahan yang harus dipecahkan karena mereka adalah kunci utama penggerak roda pembangunan nantinya.

https://pegunungantintengkab.bps.go.id

4.2.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkualitas SDM yang ada. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Seseorang dengan tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang masih tergolong rendah

Berdasarkan data Susenas 2018 penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang usia 15 tahun keatas yang belum/tidak mempunyai ijazah SD/sederajat mencapai 55,13 persen. Makin tinggi tingkat pendidikan persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut semakin sedikit.

Gambar 4.12 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

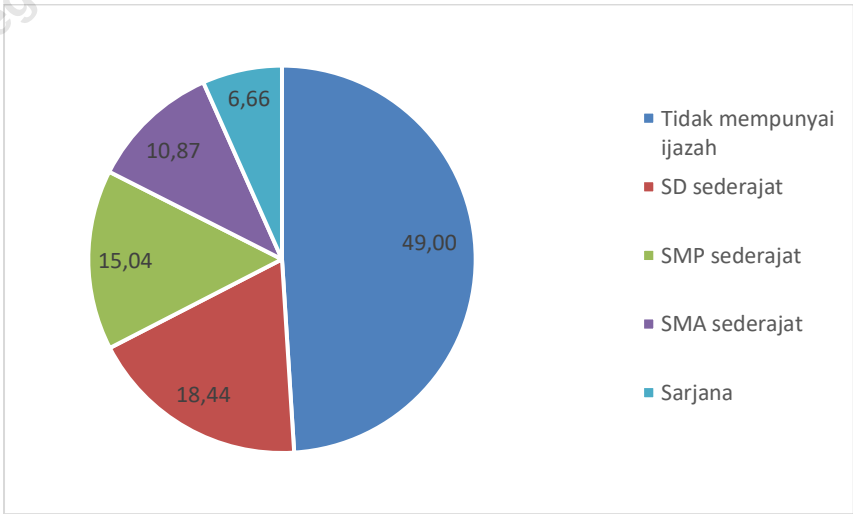

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Tercatat penduduk yang berijazah SD, SMP, SMA, dan Diploma/Sarjana di Kabupaten Pegunungan Bintang berturut-turut sebesar 18,44 persen, 15,04 persen, 10,87 persen dan 6,66 persen. Dibanding Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan menengah ke atas di Kabupaten Pegunungan Bintang jauh lebih rendah. Hal ini sangat wajar mengingat Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan kabupaten pemekaran yang masih menitik-beratkan pada pembangunan infrastruktur pemerintahan. Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang rendah, sehingga tidak dapat berperan optimal dalam proses pembangunan daerah.

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

4.3 Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak berbasis investasi mengakibatkan tidak adanya penyerapan tenaga kerja baru.

Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan tenaga kerja dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Antara lain:

1. Pertama, apakah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang melebihi pertumbuhan capital.

2. Kedua, apakah profil penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan penduduk muda. Jika suatu daerah memiliki struktur penduduknya didominasi usia muda, maka akan semakin banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja dan perlunya kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru.

3. Ketiga, struktur ekonomi yang cenderung bukan labour intensive dan tingkat ketrampilan penduduk yang belum memadai membuat usaha penciptaan lapangan kerja baru semakin sulit dan kompleks.

4.3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sesuai dengan definisi dari BPS dan Kementrian Tenaga Kerja (kemenaker), dalam publikasi ini konsep penduduk usia kerja yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas.

Lebih dari 90 persen penduduk Pegunungan Bintang berpotensi aktif secara ekonomi

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2019, persentase terbesar penduduk usia kerja di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah penduduk bekerja (88 persen). Dari sisi produktifitas tenaga kerja hal ini cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktifitas juga tinggi. Hanya saja, produktifitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan *skill* atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktifitas yang diinginkan.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Tabel 4.4 TPAK di Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Jenis Kelamin, 2020

Penduduk	Pegunungan Bintang
Laki-laki	87,77
Perempuan	84,92
Total	**86,47**

SUMBER: SAKERNAS AGUSTUS, BPS PROVINSI PAPUA 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Sekitar 86 persen dari penduduk usia kerja di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi (penduduk yang termasuk angkatan kerja), hal ini ditunjukkan dari angka TPAK sebesar 86,47 persen. Sisanya, kurang dari 14 persen tidak aktif secara ekonomi, yaitu penduduk dengan kegiatan utama sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

Dilihat dari sisi gender, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 87,77 persen dan 84,92 persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa secara umum partisipasi penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar daripada perempuan.

4.3.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja.

Tabel 4.5 TPAK dan TKK di Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Jenis Kelamin, 2020

Penduduk	TPAK	TKK
Laki-laki	87,77	95,00
Perempuan	84,92	96,96
Total	**86,47**	**95,88**

SUMBER: SAKERNAS AGUSTUS, BPS PROVINSI PAPUA 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Mengingat data kesempatan kerja sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa kesempatan kerja didefinisikan dengan banyaknya lapangan kerja yang terisi, yang tercermin dari persentase penduduk yang bekerja dari total seluruh angkatan kerja yang tersedia. Dalam hal ini seseorang dikategorikan bekerja apabila dia melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu porsi penduduk yang termasuk angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja.

Lebih dari 95 persen angkatan kerja di Pegunungan Bintang terserap dalam lapangan kerja yang ada

Pada Tabel 4.5 ditunjukkan bahwa TKK perempuan sebesar 96,96 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TKK laki-laki yaitu sebesar 95,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal ketenagakerjaan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan bisa dikatakan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini perlu dicermati terkait dengan jenis lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pegunungan Bintang. Secara keseluruhan (total laki-laki dan perempuan), sekitar 95,88 persen dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten

Pegunungan Bintang terserap dalam berbagai lapangan pekerjaan. Adapun sektor lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sektor primer, dalam hal ini pertanian. Penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing sektor dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja di Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Utama, 2020

Sektor Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
PRIMER **(Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan)**	34743	81,543
SEKUNDER **(Pertambangan dan Penggalian, Industri, LGA, dan Konstruksi)**	865	2,03
TERSIER **(Perdagangan, Angkutan, Keuangan, dan Jasa-jasa lainnya)**	7003	16,43
Total	**42 611**	**100**

SUMBER: SAKERNAS AGUSTUS, BPS PROVINSI PAPUA 2020

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

Sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Papua yang memiliki karakteristik sebagian besar penduduk bekerja di sektor primer, utamanya pertanian, begitu juga dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, sekitar 81 persen penduduknya juga bekerja di sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Pegunungan Bintang yang bekerja di sektor pertanian, tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi.

Sektor tersier, termasuk jasa-jasa hanya menyerap sekitar 16 persen. Sementara sektor sekunder, yang di dalamnya termasuk sektor industri, pertambangan dan penggalian, Listrik, Gas, dan Air Bersih, serta Konstruksi hanya menyerap 2,03 persen. Di sini tampak bahwa sektor-sektor yang membutuhkan *skill* dan pendidikan tinggi kurang banyak menyerap tenaga kerja.

Sebagian besar penduduk Pegunungan Bintang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan ubi dan palawija

4.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka *(open unemployment)* didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari:

a. Mereka yang mencari pekerjaan

b. Mereka yang mempersiapkan usaha

c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi diantara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan masih mencari perkerjaan lain, untuk kasus tersebut dia akan tergolong sebagai bekerja.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Tabel 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

Penduduk	Pegunungan Bintang
Laki-laki	5
Perempuan	3,04
Total	**4,12**

Sumber: Sakernas Agustus, BPS Provinsi Papua 2020

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

Tingkat pengangguran terbuka diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2020 adalah 4,12 persen, dimana TPT perempuan lebih kecil dibanding TPT laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 3,04 persen dan 5 persen. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induknya, TPT Kabupaten Pegunungan Bintang masih relatif lebih rendah.

4.4 Kesehatan

Kondisi kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam pembahasan kualitas hidup manusia. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup (salah satu komponen IPM atau cermin keberhasilan pembangunan manusia), dan mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok umum yaitu upaya perbaikan kesehatan, status kesehatan dan penunjang. Dalam subbab ini hanya dibatasi beberapa indikator upaya perbaikan kesehatan, adapun indikator penunjang akan dibahas dalam subbab selanjutnya.

4.4.1 Penolong Kelahiran

Salah satu indikator dari pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah penolong persalinan. Penolong kelahiran sangat penting bagi keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan. Keberhasilan persalinan akan menunjang angka harapan hidup.Indikator ini dihitung sebagai persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya. Indikator ini cukup memegang peranan penting dalam melihat kondisi kesehatan suatu wilayah karena dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat proses kelahiran dimana resiko kematian amat tinggi.

Masih banyak proses persalinan yang ditolong oleh tenaga non-medis

Di Kabupaten Pegunungan Bintang sendiri pada tahun 2019 tercatat hanya terdapat 34.05 persen proses kelahiran terakhir yang ditangani oleh tenaga medis (dokter/bidan/tenaga medis lainnya). Sedangkan sisanya sekitar 65.95 persen proses kelahiran masih ditolong oleh tenaga bukan medis (dukun, famili dan lainnya).

Gambar 4.13 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

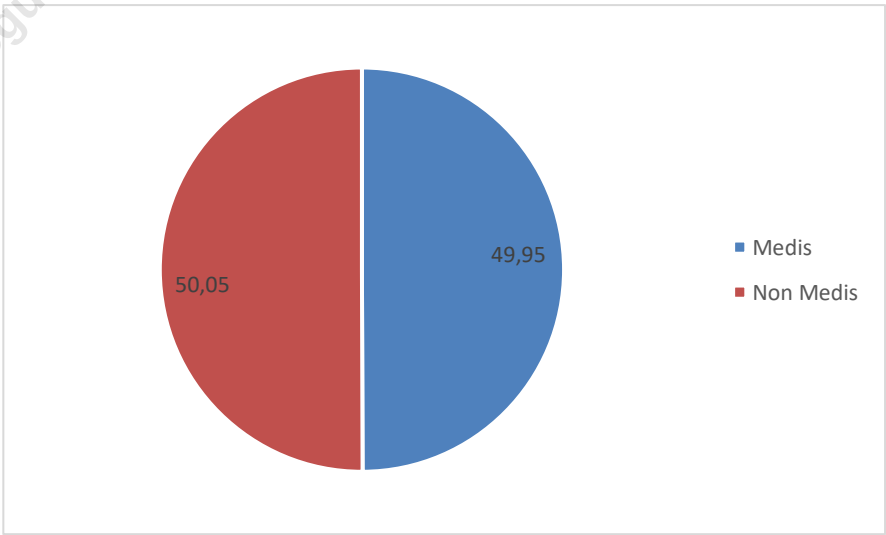

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Dilihat dari persentase penolong kelahiran yang ditangani oleh tenaga medis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kelahiran yang ditangani oleh tenaga medis sudah cukup tinggi, hal ini terbukti dengan sudah banyaknya masyarakat yang menjadikan tenaga medis sebagai penolong kelahiran, namun angka penolong kelahiran yang dibantu tenaga non medis masih cukup tinggi, yaitu 50,05 persen. Hal ini diakibatkan oleh sarana kesehatan puskesmas dan tenaga medis di Kabupaten Pegunungan Bintang masih sangat terbatas dan hanya berada di ibukota Kabupaten dan distrik, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan baik.

Masih cukup banyak proses persalinan yang dibantu oleh tenaga non medis

Masih cukup tingginya proses persalinan yang ditolong oleh tenaga non medis, harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Jika tidak, angka kematian bayi ataupun ibu pada saat masa persalinan akan menjadi besar. Tentunya hal ini akan sangat mempengarui capaian IPM di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan akan mempurpuruk kinerja pembangunan manusianya jika tidak segera dicari jalan keluarnya.

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

4.4.2 Penduduk dan Keluhan Sakit

Salah satu indikator untuk menunjukan derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan rata-rata lama sakit yang dideritanya. Indikator ini menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain itu indikator ini menggambarkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita. Semakin besar nilai indikator ini semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialami.

Dari Gambar 4.14 terlihat bahwa pada tahun 2020, persentase penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 29,15 persen. Dari penduduk yang memiliki keluhan kesehatan tersebut yang hingga menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebesar 48,49 persen.

14-15 dari 100 orang penduduk mengalami sakit dan rata-rata hari sakitnya sekitar 5 – 6 hari

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya) yang disebut sebagai angka morbiditas atau angka kesakitan. Berdasarkan data Susenas Maret 2020, angka morbiditas Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 14,14 yang artinya 14-15 orang dari 100 penduduk menderita sakit.

Gambar 4.14 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Sakit dan Terganggu Kegiatan Sehari-hari Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

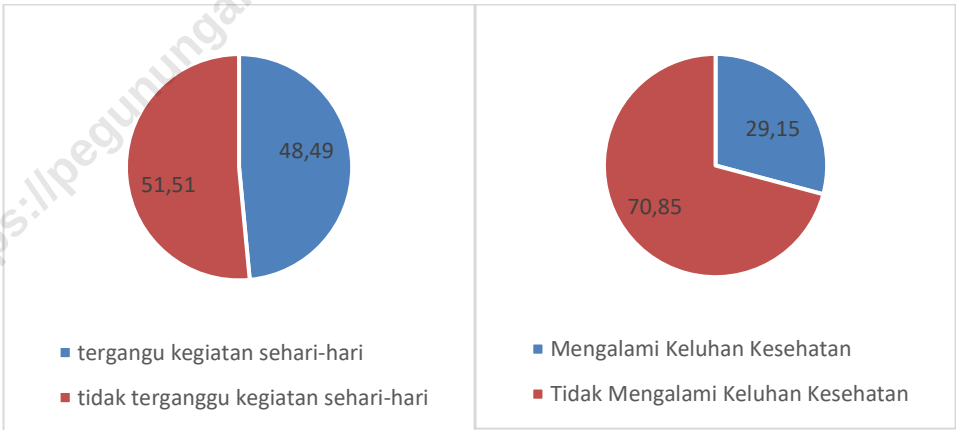

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

Dilihat dari angka morbiditas, sekilas derajat kesehatan penduduk di Pegunungan Bintang sudah cukup baik. Namun demikian kita perlu berhati-hati membaca data ini, mengingat kebanyakan masyarakat di Pegunungan Bintang terbiasa hidup di tempat yang apa adanya dengan kondisi yang kurang layak

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

dipandang dari sudut kesehatan. Mereka merasa jika keluhan kesehatan yang mereka alami tidak terlalu mengganggu aktifias kegiatan sehari-harinya maka mereka tidak mengatakan bahwa mereka sedang sakit.

Apapun permasalahan di atas, pemerintah daerah harus tetap berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menyediakan tenaga-tenaga kesehatan sampai ke pelosok kampong. Sehingga pada saat masyarakat mengalami keluhan kesehatan, tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan yang siap sedia melayani pengobatan. Terkait dengan IPM, semakin baik derajat kesehatan masyarakat akan menurunkan tingkat kematian dan pada akhirnya dapat menaikan angka harapan hidup.

Keterangan Berobat jalan ke Fasilitas Kesehatan

Kesadaran masyarakat yang sakit untuk berobat tergolong rendah

Keterangan berobat khusunya ke fasilitas kesehatan juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Apabila masyarakat mengalami sakit kemudian pergi berobat ke fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga medis yang berkompeten maka peluang kesembuhannya akan semakin besar dibandingkan jika mereka tidak berobat ke fasilitas kesehatan.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Gambar 4.15 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Sakit dan Berobat Jalan di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

Dari grafik di atas tampak bahwa tingkat kesadaran masyarakat Pegunungan Bintang yang mengalami sakit untuk berobat ke fasilitas kesehatan masih buruk. Sebesar 32,61 persen diantara penduduk yang mengalami sakit untuk pergi berobat ke fasilitas kesehatan, dan 67,39 persen di antara penduduk yang mengalami sakit memutuskan untuk tidak berobat jalan.

Kurangnya fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil menyebabkan masyarakat yang sakit banyak yang tidak berobat

https://pegununganbintangkab.bps.go.id/

Gambar 4.16 Alasan Penduduk yang Mengalami Keluhan Sakit dan Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

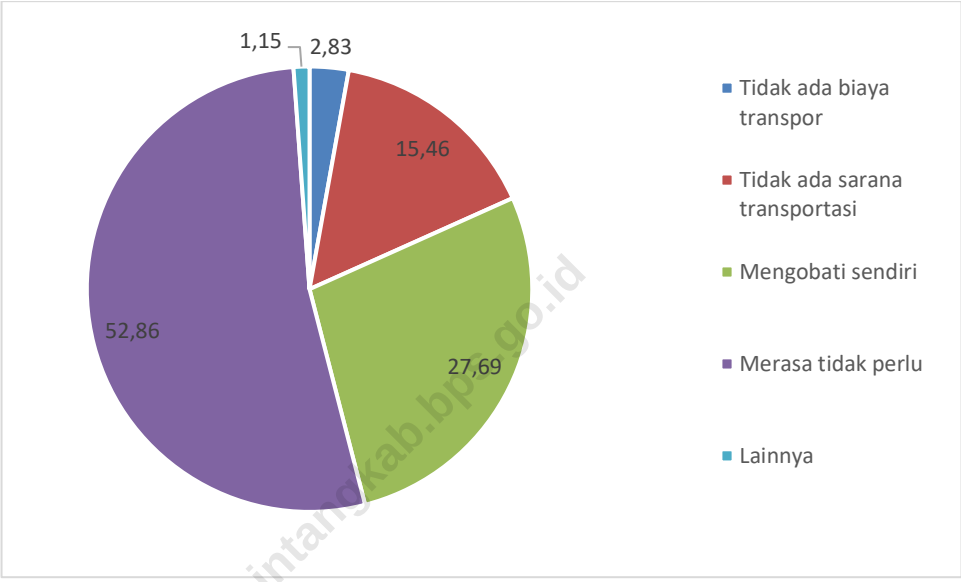

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Tampak bahwa alasan masyarakat Pegunungan Bintang yang mengalami sakit dan memilih untuk tidak berobat bukan karena tidak ada biaya berobat (biaya kesehatan di Pegunungan Bintang sudah gratis) akan tetapi karena kebanyakan masyarakat sudah merasa tidak perlu untuk berobat yaitu sebesar 52,86 persen. Kemudian, mayoritas penduduk tidak berobat karena merasa cukup dengan mengobati sendiri yaitu sebesar 27,69 persen baik dengan obat-obatan maupun ramuan tradisional. Selain dua alasan tersebut, penduduk yang mengalami keluhan kesakitan yang tidak berobat sebesar 15,46 persen beralasan tidak ada sarana transportasi.

4.5 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Manusia dan alam lingkungannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan ini berupa lingkungan fisik dan lingkungan social. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal.

Rumah yang bersih dan nyaman dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk

Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan pangan. Pada saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi lebih jauh lagi adalah sebagai tempat tinggal. Bahkan menurut Jatman (1948:170) rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup, simbol status dan juga menunjukkan identitas pemiliknya.

https://pegunungan-bintang-kab.bps.go.id

4.5.1 Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Karena itu, aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan bagi penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Rumah yang baik memiliki luas lantai minimum 10 m^2 perkapita

Rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang relatif luas Semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga maka semakin luas rumah yang ditempati.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah yang memiliki luas lantai minimal 10 m^2 perkapita.

Gambar 4.17 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kondisi Perumahan Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

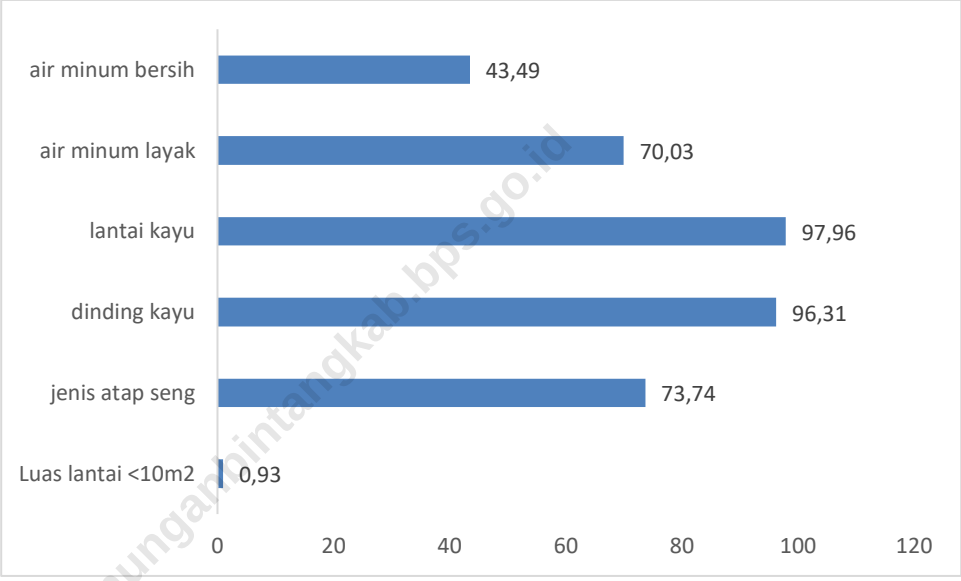

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Keadaan perumahan penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 0,93 persen yang memiliki luas lantai ≥ 10 m^2 per kapita. Hal ini ditunjukkan dalam Gambar 4.17 dimana kondisi rumah yang belum memenuhi syarat sehat menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) dengan luas lantai perkapita kurang dari 10 m^2. Sempitnya rumah yang didiami oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang dapat menimbulkan ketidaknyamanan maupun menurunkan derajat kesehatan penghuninya yang kemudian pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk.

Kualitas rumah juga ditinjau dari segi jenis atap, lantai, dan dinding terluas yang digunakan. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, mayoritas perumahan yang ditempati oleh penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki jenis atap seng sebesar 73,74 persen. Begitupun dengan jenis dinding dan lantai tempat tinggal penduduk paling banyak ditemui yang terbuat dari kayu yaitu sebesar 96,31 persen dan 97,96 persen. Kemudian sumber air minum rumah tangga paling banyak berasal dari sumber air minum layak yaitu sebesar 70,03 persen, sedangkan rumah tangga yang mengkonsumsi dari sumber air minum bersih hanya sebesar 43,49 persen. Sumber Air Minum Bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m. Sedangkan, Sumber Air Minum Layak adalah sumber air minum yang berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.

Sebagian besar rumah menggunakan jenis dinding dan lantai kayu serta atap seng

https://pegunungan-bintang.bps.go.id

4.5.2 Fasilitas Rumah

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya fasilitas pendukung perumahan seperti listrik, air bersih serta tersedianya jamban dan tangki septik.

Gambar 4.18 Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

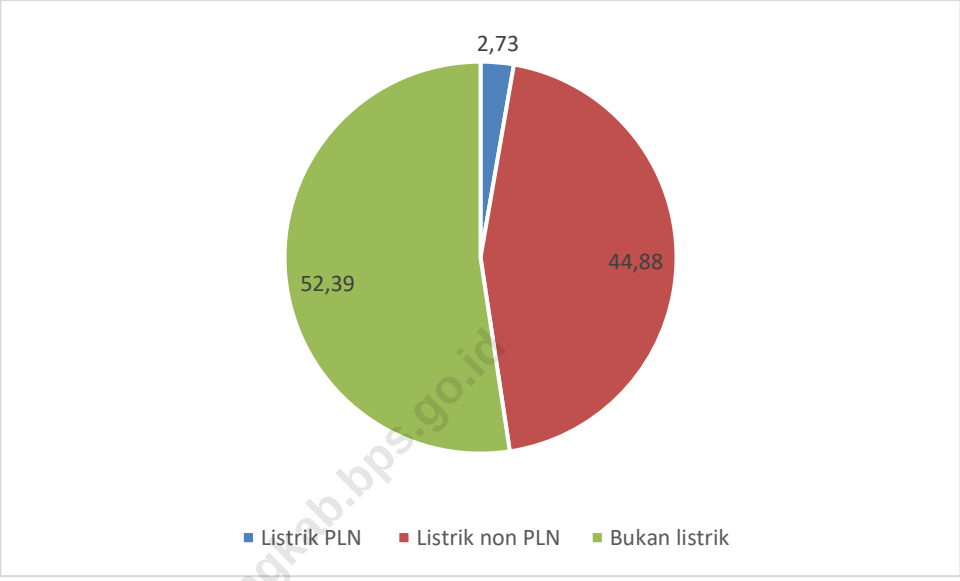

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi 2020

https://pegunungunbintangkab.bps.go.id

Masih banyak masyarakat Pegunungan Bintang yang belum menikmati listrik

Berdasarkan data Susenas Maret tahun 2020, hanya 2,73 persen rumah tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Hal ini karena listrik PLN (tenaga surya) baru tersedia di Distrik Kolomdol saja. Kemudian sebanyak 44,88 persen menggunakan listrik non-PLN sebagai sumber penerangan rumahnya. Listrik non-PLN ini kebanyakan adalah solar sel bantuan di rumah sosial yang terpasang di setiap rumah, di beberapa distrik juga ada tenaga listrik mikrohidro dan tenaga surya dalam skala kecil. Kemudian sebanyak 52,39 persen menggunakan penerangan bukan listrik, biasanya rumah tangga ini menggunakan kayu bakar sebagai penerangan sekaligus memasak. Hal ini berarti pelayanan listrik masih sangat minim dan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sistem pembuangan kotoran/tinja manusia juga sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan.

Gambar 4.19 Fasilitas Buang Air Besar Rumah Tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

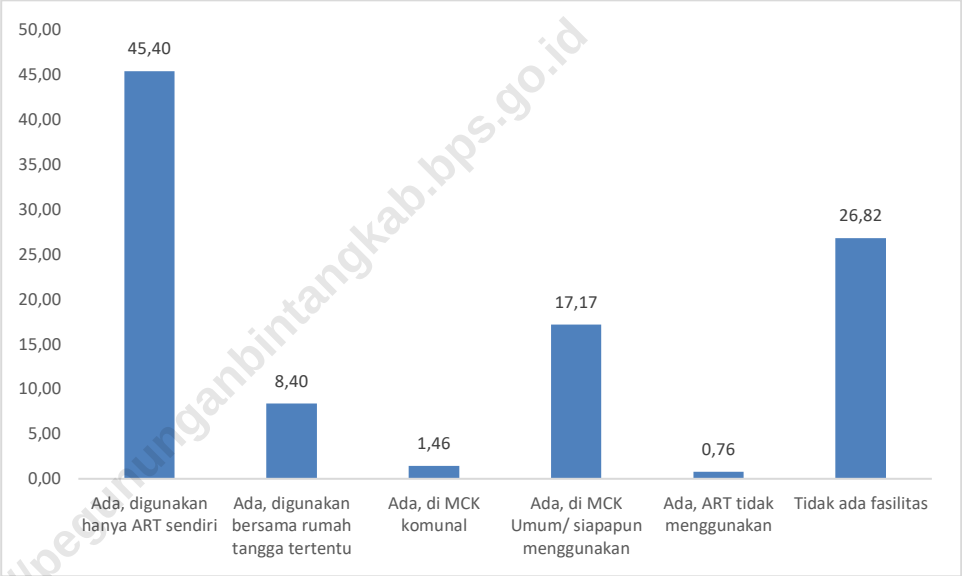

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

Berdasarkan data Susenas 2020, sekitar 73,18 persen rumah tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang telah menggunakan fasilitas buang air besar baik penggunaannya untuk sendiri (45,4 persen), bersama atau digunakan beberapa rumah tangga (8,4 persen) maupun umum (17,17 persen). Masih ada sekitar 26,82 persen rumah tangga yang tidak menggunakan maupun mempunyai fasilitas buang air.

Masih ada rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB

Gambar 4.20 Tempat Pembuangan Tinja Rumah Tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

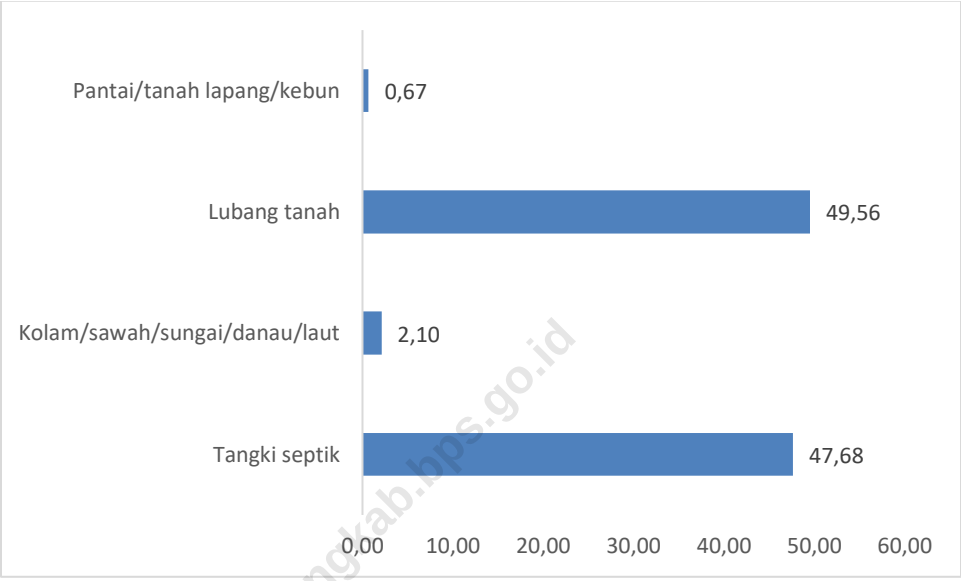

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

https://pegunungan-bintangkab.bps.go.id

Dilihat dari sistem pembuangan kotoran, sebagian besar rumah tangga Kabupaten Pegunungan Bintang memanfaatkan tangki septik sebagai tempat pembuangan kotoran yaitu sebesar 47,68 persen. Rumah tangga yang menggunakan lubang tanah sebesar 49,56 persen. Sedangkan sisanya, masih ada rumah tangga yang memanfaatkan kebun atau sungai sebagai tempat pembuangan kotoran.

Tingkat Sanitasi masyarakat di Pegunungan Bintang tergolong rendah

4.6 PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi.

Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (Engel's Law). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup, namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Di negara-negara yang lebih maju, persentase konsumsi makanan biasanya di bawah 50%. Disamping itu, di negara-negara berkembang dari segi pemerataan pendapatan masih sulit diwujudkan. Dalam usaha pemerataan pendapatan ini pemerintah berusaha memberantas kemiskinan dengan jalan pemerataan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan pemerataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

https://pegunungan-bintang-kab.bps.go.id

4.6.1 Distribusi Pendapatan dan Gini Rasio

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk antara lain gini rasio dan kriteria Bank Dunia.

Gini rasio merupakan ukuran distribusi pendapatan yang mempunyai nilai nol sampai dengan satu. Apabila nilai gini rasio mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila gini rasio mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Gini ratio dibagi dalam tiga kategori:

a. GR> 0,5 keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi.

b. GR 0,4 – 0,5 keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan sedang.

c. GR < 0,4 keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan rendah.

Kriteria Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang, 20% penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40% penduduk berpendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria:

a. Bila menerima kurang dari 12% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi.

b. Bila menerima 12% - 17% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

c. Bila menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah.

Tabel 4.8 Distribusi Pendapatan Penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020

Distribusi Pendapatan Penduduk	Kriteria Bank Dunia	Gini Ratio
40% berpendapatan rendah	**14,64**	**0,4482**
40% berpendapatan sedang	33,18	
20% berpendapatan tinggi	52,18	
TOTAL	**100,00**	

Sumber : Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

Distribusi pendapatan masyarakat Pegunungan Bintang tergolong tidak merata

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada tahun 2020, 40 persen rumah tangga berpendapatan rendah dapat menikmati 14,64 persen pendapatan. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki ketimpangan sedang. Sejalan dengan hasil Bank Dunia, rasio gini pendapatan penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2019 adalah sebesar 0,448 yang berarti berdasarkan indikator rasio gini, maka tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk kategori ketidak-merataan rendah.

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

4.6.2 Pengeluaran Rumah Tangga dan Pengeluaran Penduduk Menurut Jenis Pengeluaran

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih relatif besar (lebih dari 50%) dari total pengeluaran per kapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran per kapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah merupakan bagian terbesar dari pengeluaran per kapita.

Gambar 4.21 Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

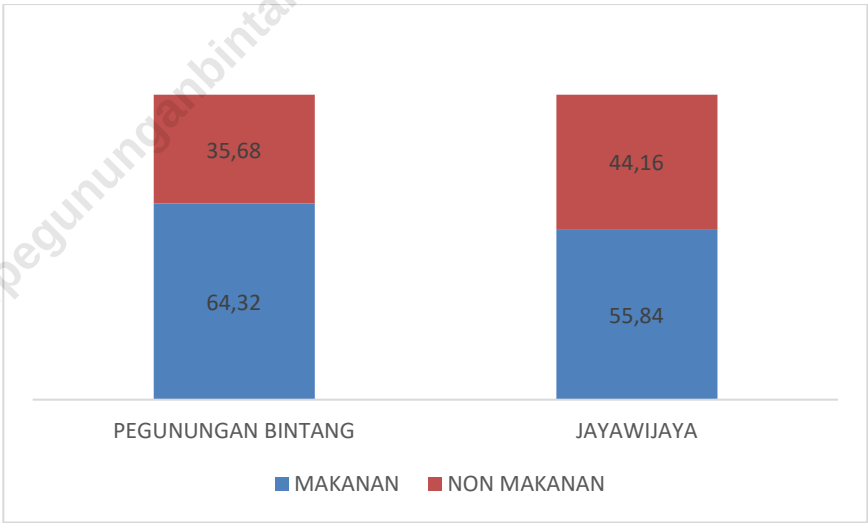

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

Pengeluaran per kapita menurut jenis pengeluaran makanan sebulan di Kabupaten Pegunungan Bintang tersaji pada Gambar 4.21. Berdasarkan hasil Susenas,

pengeluaran konsumsi makanan per kapita per bulan pada tahun 2020 sebesar 64,32 persen dan non makanan sebesar 35,68 persen. Dibanding dengan kabupaten induk Jayawijaya, persentase rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan Kabupaten Pegunungan Bintang lebih tinggi walau tidak berbeda signifikan. Tercatat persentase rata-rata pengeluaran makanan per kapita Kabupaten Jayawijaya sebesar 55,84 persen.

Pengeluaran penduduk Pegunungan Bintang sebagian besar digunakan untuk konsumsi makanan

Pada tahun 2020 perbandingan komposisi pengeluaran makanan dan non makanan di Kabupaten Pegunungan Bintang masih belum mengikuti pola pengeluaran negara maju dimana pengeluaran untuk kelompok makanan lebih dominan dibandingkan dengan pengeluaran non makanan.

https://pegunungunbintangkab.bps.go.id

4.7 Tingkat Kemiskinan

Indikator lainnya yang mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

4.7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Gambar 4.22 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kab. Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan Provinsi Papua, 2017 - 2019

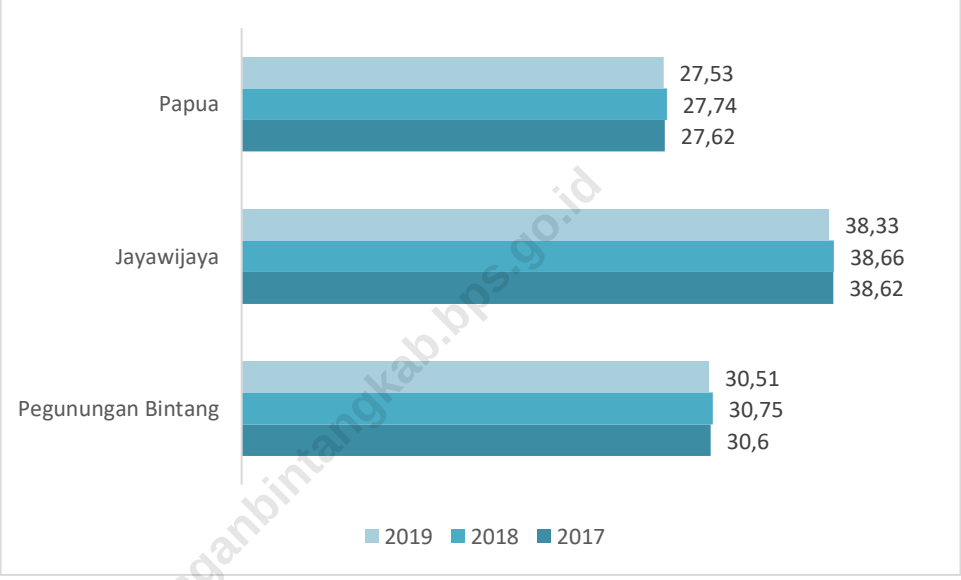

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2019

https://pegunungganbintangkab.bps.go.id

Selama tiga tahun terakhir persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2017 penduduk miskin di Pegunungan Bintang sebesar 30,6 persen dan turun menjadi 30,51 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan program pembangunan kesejahteraan masyarakat di Pegunungan Bintang sudah membuahkan hasil meskipun pencapaiannya tidak signifikan. Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan oleh Pemerintah daerah Pegunungan Bintang untuk meningkatkan program-program pembangunan khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4.23 Persentase Penduduk Miskin Kab. Pegunungan Bintang dan Wilayah Pemekaran Lainnya, 2019

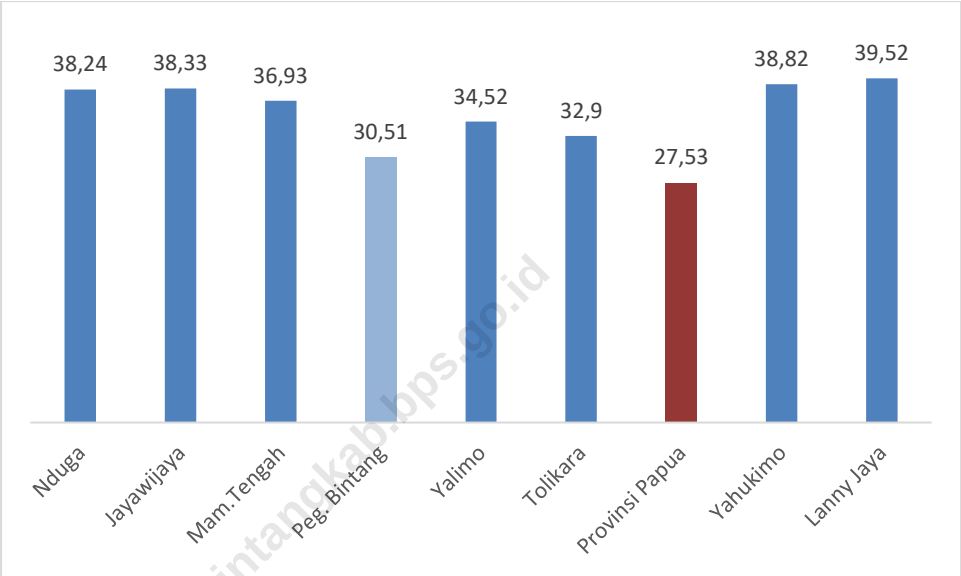

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2019

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Dari gambar di atas tampak bahwa tingkat kemiskinan tahun 2019 di Pegunungan Bintang termasuk yang paling rendah dibanding wilayah pemekaran lainnya, bahkan lebih rendah dari kemiskinan kabupaten induk Jayawijaya meskipun nilainya masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesejahteraan masyarakat di Pegunungan Bintang tahun 2019 masih lebih baik daripada wilayah pemekaran lainnya.

Adapun jumlah penduduk miskin Pegunungan Bintang dalam kurun tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 22.410 jiwa, kemudian meningkat menjadi 22.810 jiwa pada tahun 2018. Selanjutnya angka tersebut bertambah pada tahun 2019 menjadi sebesar 23.010 jiwa.

Namun demikian, indikator yang lebih sensitif digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk adalah indikator persentase penduduk miskin.

4.7.2 Garis Kemiskinan

Gambar 4.24 Garis Kemiskinan Kab. Pegunungan Bintang dan Wilayah Pemekaran Lainnya, 2019

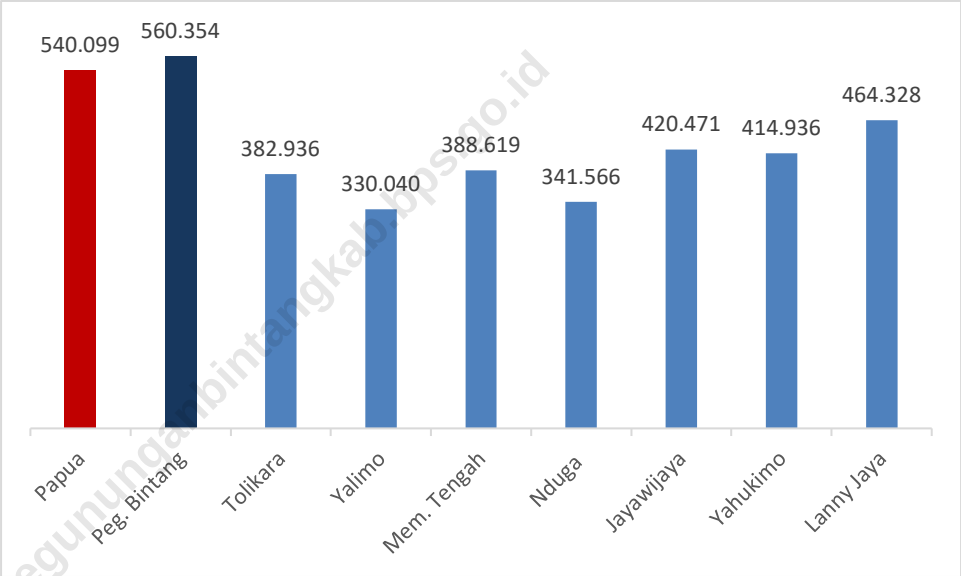

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2019

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Pada gambar di atas tampak bahwa garis kemiskinan tahun 2019 Pegunungan Bintang adalah yang paling tinggi dibanding wilayah pemekaran lainnya yaitu sebesar Rp 560.354, bahkan lebih tinggi dari garis kemiskinan Papua sebesar Rp 540.099. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap penduduk Pegunungan Bintang untuk memenuhi kebutuhan minimum per bulan baik untuk jenis

makanan dan non makanan adalah lebih besar dibanding wilayah lainnya. Hal ini disebabkan karena harga-harga komoditi di Pegunungan Bintang sangat mahal mengingat semua bahan kebutuhan diangkut menggunakan pesawat yang merupakan salah satu akses keluar masuk dari kabupaten.

4.7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Sisi lain dari kemiskinan selain jumlah dan persentase penduduk miskin yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

Gambar 4.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Peg. Bintang dan Wilayah Pemekaran Lainnya, 2020

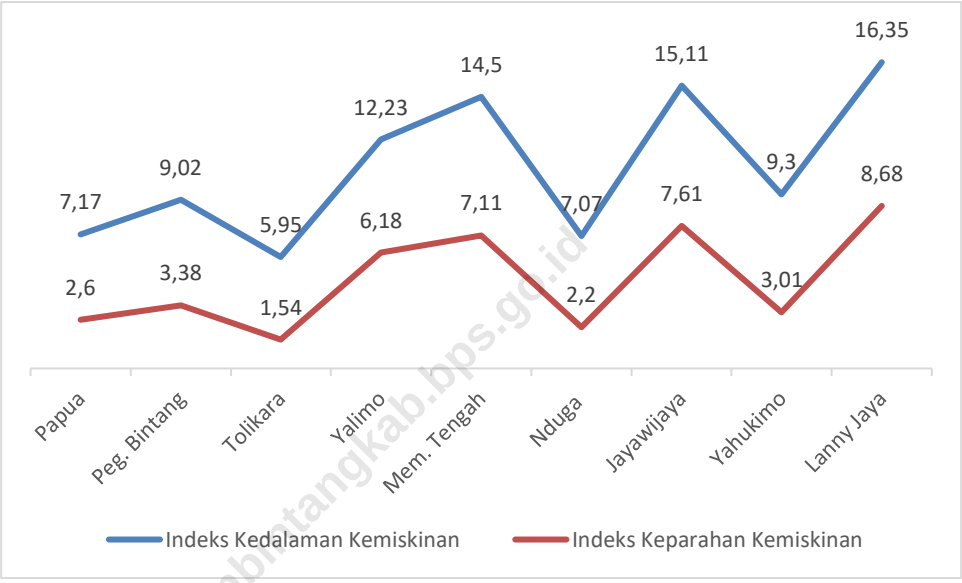

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2020

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Pada Gambar 4.25 menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Pegunungan Bintang tahun 2019 sebesar 9.02, dimana nilainya lebih rendah dari P1 Kabupaten induknya Jayawijaya yaitu sebesar 15.11. Namun jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Papua, Kabupaten Pegunungan Bintang masih lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Pegunungan Bintang tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan. Kemudian nilai P1 Kabupaten Pegunungan Bintang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa wilayah pemekaran lainnya.

Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Pegunungan Bintang tahun 2019 sebesar 3.38, nilai P2 ini juga masih lebih rendah dari P2 Jayawijaya. Namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan P2 Provinsi Papua. Dengan kata lain tingkat

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Pegunungan Bintang masih lkecil. Kemudian nilai P2 Kabupaten Pegunungan Bintang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa wilayah pemekaran lainnya.

Gambar 4.26 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Peg. Bintang Tahun 2017- 2019

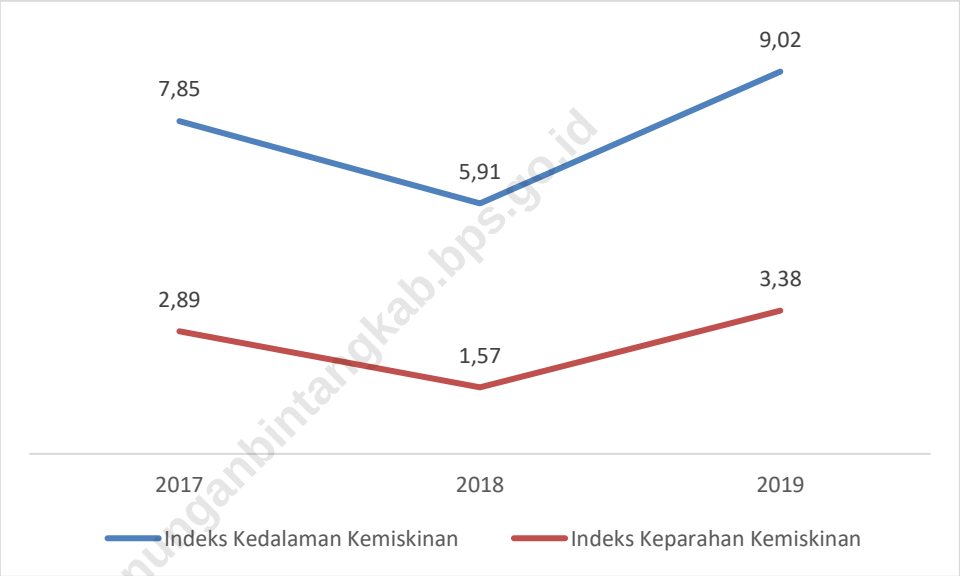

Sumber: Susenas Maret, BPS Provinsi Papua 2019

https://pegunungganbintangkab.bps.go.id

Pada tahun 2019, baik untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Pegunungan Bintang mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 7.85 menurun menjadi 5.91 pada tahun 2018 kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 9.02. Demikian juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 2.89 pada tahun 2017 menjadi 1.57 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 3.38 pada tahun 2019.

Penurunan nilai yang terjadi pada indeks P1 pada tahun 2018 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini bisa diakibatkan karena daya beli penduduk miskin yang mengalami peningkatan. Sebaliknya, indeks P1 pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan tahun 2019. Hal ini dapat disebabkan karena terjadi penurunan daya beli dari penduduk miskin.

Penurunan nilai indeks P2 pada tahun 2018 menggambarkan semakin rendahnya ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kemudian pada tahun 2019 indkes P2 mengalami peningkatan yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan indeks P2 pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan berkonsentrasi lebih pada penduduk yang yang berada dibawah garis kemiskinan.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

KESIMPULAN DAN SARAN

5

5.1 KESIMPULAN

Dari berbagai uraian tentang pembangunan manusia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ada 3 (tiga) komponen penting dalam penyusunan Indeks pembangunan Manusia (IPM) yaitu Lamanya Hidup (*longevity*) diwakili oleh Angka Harapan Hidup, Pengetahuan/tingkat pendidikan (*knowledge*) diwakili oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta standar hidup (*decent living*) yang diwakili oleh Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan.
2. Angka IPM Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 sebesar 45,44. Angka ini masuk dalam kategori kinerja pembangunan rendah. Sedangkan angka IPM Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah 60,44. IPM Pegunungan Bintang tahun 2020 berada di peringkat 27 dari 29 Kabupaten/Kota se Papua.
3. Angka harapan hidup Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 sebesar 64,44 tahun, lebih rendah dibanding angka harapan hidup Provinsi Papua pada tahun yang sama yaitu sebesar 65,79 tahun. Angka Harapan Hidup Pegunungan Bintang tahun 2020 berada di urutan 23 dari 29 Kabupaten/Kota se Papua.
4. Bila dilihat dari pengetahuan/tingkat pendidikan, Harapan Lama Sekolah di Pegunungan Bintang tahun 2020 sebesar 6,25 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 2,81 tahun. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Pegunungan Bintang tahun 2020 berada pada peringkat 27 dan 26 dari 29 Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
5. Bila dilihat dari standar hidup, rata-rata pengeluaran riil perkapita pertahun penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2020 sebesar Rp5.409.000,-.

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

5.2 SARAN

Selanjutnya berkaitan dengan kesimpulan di atas, beberapa saran yang perlu disampaikan adalah :

1. Analisa IPM memberikan gambaran umum tentang kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, dimana Kabupaten Pegunungan Bintang berada pada kategori “rendah”, dan masih perlu ditingkatkan berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia seperti faktor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
2. Perlu diciptakannya iklim yang mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor tersebut diatas melalui program-program pembangunan yang tepat dan terarah.
3. Diperlukan *Strategic Planning* yang komprehensif dalam bidang peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang secara strategis memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup manusia, seperti: jalan raya, jembatan dan air bersih yang memungkinkan mobilitas aktifitas ekonomi dan sosial dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Dibutuhkan penambahan dukungan dana dari pemerintah daerah yang memadai guna memacu pencapaian peningkatan percepatan pembangunan terutama dalam masalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah.

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang. 2020. *Pegunungan Bintang Dalam Angka 2020*. Oksibil. BPS Kab. Pegunungan Bintang.

BPS, UNDP, dan Bappenas. 2001. *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001*. Jakarta: BPS.

BPS. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Jakarta.

BPS. 2015. *Bahan Sosialisasi IPM Metode Baru*. Sosialisasi 14 Juli 2015, Jakarta.

BPS. 2018. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta.

Ritonga, Razali, 2006. *Indeks Pembangunan Manusia*. Kompas 20 Desember 2006. Opini Halaman 4.

SMERU. *Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kenerja Pelayanan Publik*. 2002. Jakarta.

Tjiptoherijanto, P. dan Soesetyo. 1996. *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Todaro, M.P., Stephen C.S. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. (Jilid 1 dan 2, Terjemahan Haris Munandar). Jakarta : Erlangga.

UNDP. 2007. *Human Development Report 2006-2007* : *The Human Development Index*.

https://pegunungganbintangkab.bps.go.id

LAMPIRAN

https://pegunungan bintang.bps.go.id

Lampiran 1, Indeks Komponen IPM Per Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	AHH	HLS	RLS	PPP	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	67,00	13,88	8,72	10 097	70,09
2	Jayawijaya	59,64	12,27	5,51	7 441	58,03
3	Jayapura	67,05	14,20	10,04	9 898	71,69
4	Nabire	68,06	11,92	10,00	8 840	68,83
5	Yapen Waropen	69,12	12,73	9,46	7 484	67,66
6	Biak Numfor	68,25	13,96	10,33	9 705	72,19
7	Paniai	66,44	10,49	4,57	6 361	56,31
8	Puncak Jaya	65,15	7,24	3,62	5 282	48,37
9	Mimika	72,32	12,40	10,17	11 431	74,19
10	Boven Digoel	59,97	11,07	8,78	7 947	61,53
11	Mappi	65,11	10,55	6,31	6 353	58,15
12	Asmat	58,05	9,02	4,94	5 733	50,55
13	Yahukimo	65,93	7,61	4,26	4 875	49,37
14	Pegunungan Bintang	64,44	6,25	2,81	5 409	45,44
15	Tolikara	65,71	8,60	3,64	4 826	49,50
16	Sarmi	66,36	12,05	8,82	6 600	63,63
17	Keerom	66,69	12,42	8,01	8 910	66,40
18	Waropen	66,33	12,79	9,20	6 732	64,94
19	Supiori	65,94	12,74	8,81	5 677	62,3
20	Membramo Raya	57,77	11,79	5,66	4 581	51,78
21	Nduga	55,27	3,61	1,13	3 975	31,55
22	Lanny Jaya	66,06	8,62	3,20	4 350	47,86
23	Mamberamo Tengah	63,59	8,93	3,15	4 462	47,57
24	Yalimo	65,42	9,11	2,79	4 647	48,34
25	Puncak	65,74	5,39	2,15	5 378	43,04
26	Dogiyai	65,73	10,58	4,93	5 373	54,84
27	Intan Jaya	65,60	7,65	2,84	5 283	47,79
28	Deiyai	65,24	9,81	3,01	4 632	49,46
29	Kota Jayapura	70,45	15,01	11,56	14 763	79,94
PAPUA		65,79	11,08	6,69	6 954	60,44

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Keterangan :

AHH : Angka Harapan Hidup (tahun)
HLS : Harapan Lama Sekolah (Tahun)
RLS : Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
PPP : Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan/Daya Beli (Ribu Rupiah)

Lampiran 2, Perkembangan IPM Per Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2019-2020

No	Kabupaten/Kota	IPM		Peringkat	
		2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Merauke	69,98	70,09	5	5
2	Jayawijaya	57,79	58,03	14	14
3	Jayapura	71,84	71,69	4	4
4	Nabire	68,53	68,83	6	6
5	Yapen Waropen	67,76	67,66	7	7
6	Biak Namfor	72,57	72,19	3	3
7	Paniai	56,58	56,31	15	15
8	Puncak Jaya	48,33	48,37	22	22
9	Mimika	74,13	74,19	2	2
10	Boven Digoel	61,51	61,53	12	12
11	Mappi	58,3	58,15	13	13
12	Asmat	50,37	50,55	18	18
13	Yahukimo	49,25	49,37	21	21
14	Pegunungan Bintang	45,21	45,44	27	27
15	Tolikara	49,68	49,50	20	19
16	Sarmi	63,45	63,63	10	10
17	Keerom	66,59	66,40	8	8
18	Waropen	65,34	64,94	9	9
19	Supiori	62,3	62,3	11	11
20	Membramo Raya	52,2	51,78	17	17
21	Nduga	30,75	31,55	29	29
22	Lanny Jaya	48,00	47,86	24	24
23	Mamberamo Tengah	47,23	47,57	26	26
24	Yalimo	48,08	48,34	23	23
25	Puncak	42,7	43,04	28	28
26	Dogiyai	55,41	54,84	16	16
27	Intan Jaya	47,51	47,79	25	25
28	Deiyai	50,11	49,46	19	20
29	Kota Jayapura	80,16	79,94	1	1
PAPUA		60,84	60,44		

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

Lampiran 3, Ranking Pertumbuhan Komponen AHH Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 - 2020

Kode	Provinsi/Kabupaten	ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)						Tingkat Pertumbuhan 2015 -2020 (%)	Ranking Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9400	PAPUA	65,09	65,12	65,14	65,36	65,65	65,79	0,21	
9415	Asmat	55,5	55,9	56,32	56,88	57,53	58,05	0,90	1
9429	Nduga	53,6	54,5	54,6	54,82	55,12	55,27	0,62	2
9413	Boven Digoel	58,24	58,51	58,77	59,16	59,64	59,97	0,59	3
9402	Jayawijaya	58,29	58,48	58,67	58,99	59,39	59,64	0,46	4
9428	Memberamo Raya	56,57	56,74	56,9	57,18	57,55	57,77	0,42	5
9430	Lanny Jaya	64,86	65,63	65,65	65,79	66	66,06	0,37	6
9414	Mappi	64,02	64,16	64,3	64,56	64,91	65,11	0,34	7
9411	Puncak Jaya	64,17	64,29	64,41	64,65	64,98	65,15	0,30	8
9410	Paniai	65,45	65,58	65,7	65,94	66,27	66,44	0,30	9
9431	Memberamo Tengah	62,72	62,82	62,92	63,14	63,44	63,59	0,28	10
9434	Dogiyai	64,86	64,99	65,12	65,32	65,6	65,73	0,27	11
9416	Yahukimo	65,06	65,19	65,32	65,52	65,8	65,93	0,27	12
9418	Tolikara	64,86	64,98	65,1	65,3	65,58	65,71	0,26	13
9436	Deiyai	64,47	64,55	64,63	64,83	65,11	65,24	0,24	14
9403	Jayapura	66,32	66,4	66,47	66,66	66,93	67,05	0,22	15
9427	Supiori	65,25	65,29	65,33	65,53	65,81	65,94	0,21	16
9417	Pegunungan Bintang	63,78	63,84	63,9	64,08	64,34	64,44	0,21	17
9419	Sarmi	65,69	65,76	65,82	66	66,26	66,36	0,20	18
9433	Puncak	65,08	65,1	65,13	65,33	65,61	65,74	0,20	19
9435	Intan Jaya	64,98	65,04	65,09	65,26	65,51	65,6	0,19	20
9404	Nabire	67,44	67,5	67,55	67,72	67,97	68,06	0,18	21
9426	Waropen	65,73	65,77	65,82	65,99	66,24	66,33	0,18	22
9420	Keerom	66,09	66,13	66,18	66,35	66,6	66,69	0,18	23
9432	Yalimo	64,86	64,9	64,94	65,1	65,34	65,42	0,17	24
9401	Merauke	66,5	66,53	66,56	66,71	66,93	67	0,15	25
9471	Kota Jayapura	69,97	69,99	70	70,15	70,38	70,45	0,14	26
9408	Kepulauan Yapen	68,67	68,69	68,71	68,85	69,06	69,12	0,13	27
9412	Mimika	71,89	71,9	71,93	72,06	72,27	72,32	0,12	28
9409	Biak Numfor	67,86	67,86	67,87	68	68,2	68,25	0,11	29

https://pegunungan bintangkab.bps.go.id

Lampiran 4, Ranking Pertumbuhan Komponen HLS Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 - 2020

Kode	Provinsi/Kabupaten	HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)						Tingkat Pertumbuhan 2015 -2020 (%)	Ranking Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9400	PAPUA	9,95	10,23	10,54	10,83	11,05	11,08	2,17	
9429	Nduga	2,17	2,34	2,64	2,95	3,29	3,61	10,72	1
9417	Pegunungan Bintang	4,85	5,12	5,52	5,79	6,14	6,25	5,20	2
9435	Intan Jaya	6,28	6,52	6,76	7,11	7,36	7,65	4,03	3
9411	Puncak Jaya	5,97	5,99	6,24	6,59	6,96	7,24	3,93	4
9433	Puncak	4,47	4,48	4,66	4,93	5,19	5,39	3,81	5
9415	Asmat	7,57	7,79	8,12	8,47	8,74	9,02	3,57	6
9432	Yalimo	7,71	7,82	8,2	8,46	8,83	9,11	3,39	7
9431	Memberamo Tengah	7,65	7,66	8,01	8,33	8,63	8,93	3,14	8
9430	Lanny Jaya	7,45	7,5	7,71	8,01	8,35	8,62	2,96	9
9412	Mimika	10,78	11,11	11,48	11,77	12,17	12,4	2,84	10
9402	Jayawijaya	10,82	11,01	11,3	11,58	11,93	12,27	2,55	11
9404	Nabire	10,62	10,66	10,86	11,14	11,59	11,92	2,34	12
9418	Tolikara	7,68	7,69	7,7	8,04	8,28	8,6	2,29	13
9401	Merauke	12,47	12,71	12,98	13,24	13,59	13,88	2,17	14
9428	Mamberamo Raya	10,65	10,8	11,07	11,3	11,78	11,79	2,05	15
9408	Kepulauan Yapen	11,51	11,62	11,85	12,24	12,72	12,73	2,04	16
9419	Sarmi	10,91	11,09	11,29	11,55	11,81	12,05	2,01	17
9434	Dogiyai	9,58	9,87	10,12	10,13	10,57	10,58	2,01	18
9420	Keerom	11,55	11,62	11,89	12,14	12,41	12,42	1,46	19
9471	Kota Jayapura	14,16	14,61	14,98	14,99	15	15,01	1,17	20
9409	Biak Numfor	13,44	13,68	13,93	13,94	13,95	13,96	0,76	21
9426	Waropen	12,34	12,6	12,61	12,77	12,78	12,79	0,72	22
9403	Jayapura	13,79	14,15	14,16	14,17	14,19	14,2	0,59	23
9410	Paniai	10,31	10,32	10,33	10,47	10,48	10,49	0,35	24
9416	Yahukimo	7,48	7,54	7,55	7,59	7,6	7,61	0,35	25
9414	Mappi	10,42	10,47	10,48	10,53	10,54	10,55	0,25	26
9413	Boven Digoel	10,96	10,97	10,98	10,99	11,06	11,07	0,20	27
9436	Deiyai	9,76	9,77	9,78	9,79	9,8	9,81	0,10	28
9427	Supiori	12,69	12,7	12,71	12,72	12,73	12,74	0,08	29

https://pegunungambintangkab.bps.go.id

Lampiran 5, Ranking Pertumbuhan Komponen RLS Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 - 2020

Kode	Provinsi/Kabupaten	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)						Tingkat Pertumbuhan 2015 -2020 (%)	Ranking Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9400	PAPUA	5,99	6,15	6,27	6,52	6,65	6,69	2,24	
9429	Nduga	0,64	0,7	0,71	0,85	0,97	1,13	12,04	1
9417	Pegunungan Bintang	2,06	2,19	2,32	2,49	2,61	2,81	6,41	2
9432	Yalimo	2,08	2,19	2,25	2,44	2,58	2,79	6,05	3
9433	Puncak	1,61	1,78	1,94	1,95	1,96	2,15	5,96	4
9431	Memberamo Tengah	2,49	2,57	2,67	2,78	2,9	3,15	4,81	5
9428	Memberamo Raya	4,61	4,89	5,23	5,46	5,65	5,66	4,19	6
9410	Paniai	3,76	3,77	3,94	4,2	4,38	4,57	3,98	7
9402	Jayawijaya	4,59	4,74	4,99	5,17	5,3	5,51	3,72	8
9418	Tolikara	3,06	3,21	3,5	3,62	3,63	3,64	3,53	9
9420	Keerom	6,85	7,24	7,57	7,83	8	8,01	3,18	10
9430	Lanny Jaya	2,75	2,92	3,17	3,18	3,19	3,2	3,08	11
9435	Intan Jaya	2,48	2,49	2,5	2,51	2,64	2,84	2,75	12
9411	Puncak Jaya	3,19	3,38	3,5	3,51	3,61	3,62	2,56	13
9415	Asmat	4,38	4,48	4,71	4,74	4,82	4,94	2,44	14
9413	Boven Digoel	7,72	7,82	8,08	8,32	8,55	8,58	2,13	15
9419	Sarmi	8,07	8,08	8,34	8,52	8,53	8,82	1,79	16
9427	Supiori	8,12	8,13	8,14	8,39	8,6	8,81	1,64	17
9412	Mimika	9,38	9,53	9,54	9,76	9,91	10,17	1,63	18
9426	Waropen	8,55	8,66	8,67	8,87	9,18	9,2	1,48	19
9408	Kepulauan Yapen	8,8	8,81	8,82	9,07	9,19	9,46	1,46	20
9416	Yahukimo	3,98	3,99	4	4,01	4,02	4,26	1,37	21
9403	Jayapura	9,48	9,53	9,54	9,6	9,79	10,04	1,15	22
9401	Merauke	8,24	8,26	8,27	8,49	8,56	8,72	1,14	23
9414	Mappi	5,97	5,98	6,1	6,29	6,3	6,31	1,11	24
9404	Nabire	9,47	9,48	9,49	9,53	9,7	10	1,10	25
9409	Biak Numfor	9,83	9,84	9,85	10	10,22	10,33	1,00	26
9471	Kota Jayapura	11,11	11,14	11,15	11,3	11,55	11,56	0,80	27
9436	Deiyai	2,96	2,97	2,98	2,99	3	3,01	0,34	28
9434	Dogiyai	4,88	4,89	4,9	4,91	4,92	4,93	0,20	29

https://pegunungan bintang.bps.go.id

Lampiran 6. Ranking Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 – 2020

Kode	Provinsi/Kabupaten	PENGELUARAN PER KAPITA						Tingkat Pertumbuhan 2015 -2020 (%)	Ranking Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9400	**PAPUA**	**6469**	**6637**	**6996**	**7159**	**7336**	**6954**	**1,46**	
9416	Yahukimo	4109	**4248**	**4554**	**4737**	**5030**	**4875**	3,48	**1**
9426	Waropen	6070	**6270**	**6810**	**6978**	**7018**	**6732**	2,09	**2**
9431	Memberamo Tengah	4051	**4219**	**4510**	**4609**	**4671**	**4462**	1,95	**3**
9414	Mappi	5780	**5951**	**6143**	**6268**	**6513**	**6353**	1,91	**4**
9430	Lanny Jaya	3965	**4106**	**4356**	**4517**	**4569**	**4350**	1,87	**5**
9429	Nduga	3625	**3725**	**3972**	**4131**	**4181**	**3975**	1,86	**6**
9427	Supiori	5180	**5379**	**5655**	**5769**	**5820**	**5677**	1,85	**7**
9432	Yalimo	4321	**4435**	**4702**	**4799**	**4860**	**4647**	1,47	**8**
9436	Deiyai	4320	**4383**	**4597**	**4761**	**4958**	**4632**	1,40	**9**
9418	Tolikara	4518	**4711**	**4827**	**4946**	**5142**	**4826**	1,33	**10**
9411	Puncak Jaya	4979	**5089**	**5341**	**5459**	**5523**	**5282**	1,19	**11**
9428	Memberamo Raya	4324	**4387**	**4596**	**4755**	**4807**	**4581**	1,16	**12**
9435	Intan Jaya	5015	**5038**	**5293**	**5440**	**5593**	**5283**	1,05	**13**
9402	Jayawijaya	7068	**7282**	**7524**	**7637**	**7835**	**7441**	1,03	**14**
9433	Puncak	5118	**5181**	**5413**	**5506**	**5702**	**5378**	1,00	**15**
9434	Dogiyai	5120	**5190**	**5375**	**5522**	**5709**	**5373**	0,97	**16**
9417	Pegunungan Bintang	5176	**5289**	**5506**	**5578**	**5633**	**5409**	0,88	**17**
9412	Mimika	10952	**11169**	**11591**	**11700**	**12035**	**11431**	0,86	**18**
9415	Asmat	5533	**5601**	**5771**	**5882**	**6066**	**5733**	0,71	**19**
9471	Kota Jayapura	14249	**14319**	**14781**	**14922**	**15176**	**14763**	0,71	**20**
9420	Keerom	8609	**8671**	**8824**	**8918**	**9136**	**8910**	0,69	**21**
9419	Sarmi	6379	**6417**	**6723**	**6814**	**6860**	**6600**	0,68	**22**
9410	Paniai	6161	**6191**	**6355**	**6535**	**6767**	**6361**	0,64	**23**
9413	Boven Digoel	7717	**7770**	**8048**	**8211**	**8300**	**7947**	0,59	**24**
9403	Jayapura	9622	**9653**	**10055**	**10160**	**10375**	**9898**	0,57	**25**
9408	Kepulauan Yapen	7320	**7414**	**7605**	**7739**	**7785**	**7484**	0,44	**26**
9401	Merauke	9953	**10016**	**10277**	**10430**	**10498**	**10097**	0,29	**27**
9404	Nabire	8725	**8779**	**8983**	**9143**	**9195**	**8840**	0,26	**28**
9409	Biak Numfor	9603	**9647**	**9812**	**9969**	**10211**	**9705**	0,21	**29**

https://pegunungan bintang.bps.go.id

Lampiran 7. Ranking Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 - 2020

Kode	Provinsi/Kabupaten	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA						Tingkat Pertumbuhan 2015 -2020 (%)	Ranking Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9400	**PAPUA**	**57,25**	**58,05**	**59,09**	**60,06**	**60,84**	**60,44**	**1,09**	
9429	Nduga	25,47	26,56	27,87	29,42	30,75	31,55	4,37	1
9417	Pegunungan Bintang	40,91	41,9	43,24	44,22	45,21	45,44	2,12	2
9431	Mamberamo Tengah	43,55	44,15	45,5	46,41	47,23	47,57	1,78	3
9433	Puncak	39,41	39,96	41,06	41,81	42,7	43,04	1,78	4
9432	Yalimo	44,32	44,95	46,19	47,13	48,08	48,34	1,75	5
9415	Asmat	46,62	47,31	48,49	49,37	50,37	50,55	1,63	6
9430	Lanny Jaya	44,18	45,16	46,49	47,34	48	47,86	1,61	7
9411	Puncak Jaya	44,87	45,49	46,57	47,39	48,33	48,37	1,51	8
9435	Intan Jaya	44,35	44,82	45,68	46,55	47,51	47,79	1,51	9
9428	Mamberamo Raya	48,29	49	50,25	51,24	52,2	51,78	1,41	10
9402	Jayawijaya	54,18	54,96	55,99	56,82	57,79	58,03	1,38	11
9418	Tolikara	46,38	47,11	47,89	48,85	49,68	49,5	1,31	12
9416	Yahukimo	46,63	47,13	47,95	48,51	49,25	49,37	1,15	13
9420	Keerom	63,43	64,1	64,99	65,75	66,59	66,4	0,92	14
9412	Mimika	70,89	71,64	72,42	73,15	74,13	74,19	0,91	15
9419	Sarmi	60,99	61,27	62,31	63	63,45	63,63	0,85	16
9413	Boven Digoel	59,02	59,35	60,14	60,83	61,51	61,53	0,84	17
9426	Waropen	62,35	63,1	64,08	64,8	65,34	64,94	0,82	18
9434	Dogiyai	52,78	53,32	54,04	54,44	55,41	54,84	0,77	19
9410	Paniai	54,2	54,34	54,91	55,83	56,58	56,31	0,77	20
9427	Supiori	60,09	60,59	61,23	61,84	62,3	62,3	0,72	21
9408	Kepulauan Yapen	65,28	65,55	66,07	67	67,76	67,66	0,72	22
9414	Mappi	56,11	56,54	57,1	57,72	58,3	58,15	0,72	23
9404	Nabire	66,49	66,64	67,11	67,7	68,53	68,83	0,69	24
9401	Merauke	67,75	68,09	68,64	69,38	69,98	70,09	0,68	25
9436	Deiyai	48,28	48,5	49,07	49,55	50,11	49,46	0,48	26
9471	Kota Jayapura	78,05	78,56	79,23	79,58	80,16	79,94	0,48	27
9403	Jayapura	70,04	70,5	70,97	71,25	71,84	71,69	0,47	28
9409	Biak Numfor	70,85	71,13	71,56	71,96	72,57	72,19	0,38	29

https://pegunganbintangkab.bps.go.id

Lampiran 8. Ranking Pertumbuhan IPM Berdasarkan Wilayah Adat Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2015 - 2020

Kode	Provinsi/Kabupaten / Wilayah Adat	IPM						Pertumbuhan 2015 - 2020 (%)	Ranking Pertumbuhan Wilayah Adat
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
La Pago									
9429	Nduga	25,47	26,56	27,87	29,42	30,75	31,55	4,37	1
9417	Pegunungan Bintang	40,91	41,9	43,24	44,22	45,21	45,44	2,12	2
9431	Mamberamo Tengah	43,55	44,15	45,5	46,41	47,23	47,57	1,78	3
9433	Puncak	39,41	39,96	41,06	41,81	42,7	43,04	1,78	4
9432	Yalimo	44,32	44,95	46,19	47,13	48,08	48,34	1,75	5
9430	Lanny Jaya	44,18	45,16	46,49	47,34	48	47,86	1,61	6
9411	Puncak Jaya	44,87	45,49	46,57	47,39	48,33	48,37	1,51	7
9402	Jayawijaya	54,18	54,96	55,99	56,82	57,79	58,03	1,38	8
9418	Tolikara	46,38	47,11	47,89	48,85	49,68	49,5	1,31	9
9416	Yahukimo	46,63	47,13	47,95	48,51	49,25	49,37	1,15	10
Mee Pago									
9435	Intan Jaya	44,35	44,82	45,68	46,55	47,51	47,79	1,51	1
9412	Mimika	70,89	71,64	72,42	73,15	74,13	74,19	0,91	2
9434	Dogiyai	52,78	53,32	54,04	54,44	55,41	54,84	0,77	3
9410	Paniai	54,2	54,34	54,91	55,83	56,58	56,31	0,77	4
9404	Nabire	66,49	66,64	67,11	67,7	68,53	68,83	0,69	5
9436	Deiyai	48,28	48,5	49,07	49,55	50,11	49,46	0,48	6
Anim Ha									
9415	**Asmat**	**46,62**	**47,31**	**48,49**	**49,37**	**50,37**	**50,55**	1,63	1
9413	**Boven Digoel**	**59,02**	**59,35**	**60,14**	**60,83**	**61,51**	**61,53**	0,84	2
9414	**Mappi**	**56,11**	**56,54**	**57,1**	**57,72**	**58,3**	**58,15**	0,72	3
9401	**Merauke**	**67,75**	**68,09**	**68,64**	**69,38**	**69,98**	**70,09**	0,68	4
Mamta / Tabi									
9428	Mamberamo Raya	48,29	49	50,25	51,24	52,2	51,78	1,41	1
9420	Kerom	63,43	64,1	64,99	65,75	66,59	66,4	0,92	2
9419	Sarmi	60,99	61,27	62,31	63	63,45	63,63	0,85	3
9471	Kota Jayapura	78,05	78,56	79,23	79,58	80,16	79,94	0,48	4
9403	Jayapura	70,04	70,5	70,97	71,25	71,84	71,69	0,47	5
9400	**PAPUA**	**57,25**	**58,05**	**59,09**	**60,06**	**60,84**	**60,44**	1,09	

https://pegunungbintangkab.bps.go.id

Sensus Penduduk 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

https://pegununganbintangkab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Jalan Dabolding, Kalomdol Oksibil, Pegunungan Bintang
Hompage : pegununganbintangkab.bps.go.id E-mail : bps9417@bps.go.id

ISBN 978-623-95853-3-4

9 786239 585334